



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

LKjIP 2020
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020. LKjIP Tahun 2020 ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, Februari 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DINKOMINFO
KABUPATEN TEMANGGUNG

SAMSUL HADI, S.Sos, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 196606051986071002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
B. Data Pokok Pembangunan Daerah	6
C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	75
D. Sistematika Penyusunan	77
BAB II PERENCANAAN KINERJA	78
A. Rencana Strategis	78
B. Indikator Kinerja Utama	82
C. Perjanjian Kinerja 2019	82
D. Rencana Kerja 2019	85
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	90
A. Capaian Kinerja Organisasi	90
B. Akuntabilitas Keuangan	106
C. Prestasi dan Penghargaan	111
BAB IV PENUTUP	114
A. Tinjauan Umum Capaian Perangkat Daerah	114
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	114
Lampiran-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
Lampiran-2 IKPD Tahun 2020	
Lampiran-3 Evaluasi Renja Triwulan IV tahun 2020	
Lampiran-4 Prestasi Perangkat Daerah	
Lampiran-5 Rencana Aksi Perangkat Daerah Cascading Kinerja Pohon Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 1.2	5
Tabel 1.3	8
Tabel 1.4	9
Tabel 1.5	10
Tabel 1.6	11
Tabel 1.7	12
Tabel 1.8	13
Tabel 1.9	15
Tabel 1.10	16
Tabel 1.11	16
Tabel 1.12	18
Tabel 1.13	21
Tabel 1.14	22
Tabel 1.15	25
Tabel 1.16	26
Tabel 1.17	37
Tabel 1.18	38
Tabel 1.19	41
Tabel 1.20	42
Tabel 1.21	43
Tabel 1.22	44
Tabel 1.23	46
Tabel 1.24	47
Tabel 1.25	47
Tabel 1.26	52
Tabel 1.27	54
Tabel 1.28	54
Tabel 1.29	57
Tabel 1.30	58
Tabel 1.31	60
Tabel 1.32	64
Tabel 1.33	64
Tabel 1.34	68

Tabel 1.35	68
Tabel 1.36	70
Tabel 1.37	71
Tabel 1.38	74
Tabel 2.1	81
Tabel 2.2	82
Tabel 2.3	83
Tabel 2.4	85
Tabel 3.1	90
Tabel 3.2	91
Tabel 3.3	94
Tabel 3.4	94
Tabel 3.5	95
Tabel 3.6	99
Tabel 3.7	103
Tabel 3.8	105
Tabel 3.9	107
Tabel 3.10	108
Tabel 3.11	109
Tabel 3.12	110
Tabel 3.13	111
Tabel 3.14	112

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfo Kab. Temanggung
- Gambar 1.2. Hasil Evaluasi Mandiri SPBE 2020
- Gambar 1.3. Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pemingkatan Badan Publik Tahun 2020
- Gambar 1.4. Tampilan Layar Website PPID Kabupaten Temanggung
- Gambar 1.5. Website PPID Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah/kecamatan
- Gambar 1.6. Website PPID Badan Publik Kelurahan/Desa
- Gambar 1.7. Website PPID Badan Publik Badan Usaha Milik Daerah
- Gambar 1.8. Media Komunikasi KIM Tingkat Desa
- Gambar 1.9. Grafik Okupansi Bandwidth Internet Publik
- Gambar 1.10. Grafik Okupansi Bandwidth Internet OPD, UPT/eks UPT dan Desa ISP PIKANET
- Gambar 1.11. Grafik Okupansi Bandwidth Internet OPD, UPT/eks UPT dan Desa ISP LDP
- Gambar 2.1. Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah
- Gambar 2.2. Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
- Gambar 2.3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- Gambar 2.4. Sistem Informasi Umum Pengadaan
- Gambar 2.5. Sistem Informasi Kinerja ASN
- Gambar 2.6. Sistem Informasi Kepegawaian
- Gambar 3.1. Monitoring dan Evaluasi PPID Badan Publik Kecamatan
- Gambar 3.2. Verifikasi SAQ dan Presentasi DIP di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
- Gambar 3.3. Uji Publik Badan Publik Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemingkatan Badan Publik se Jawa Tengah
- Gambar 3.4. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Diseminasi Informasi
- Gambar 3.5. Pembuatan Video Diseminasi Informasi Melalui FK Metra tentang 3M
- Gambar 3.6. Pelatihan Microsoft Office Word dan Exel kepada Guru Paud Khodijah Kec. Tembarak
- Gambar 3.7. Pemeliharaan jaringan fiber optik
- Gambar 3.8. Pemasangan jaringan berbasis radio

- Gambar 3.9. Fasilitasi vidcon Bupati dan jajaran Forkopimda
- Gambar 3.10. Fasilitasi vidcon di Pendopo Pengayoman
- Gambar 3.11. Pengembangan modul SKP pada aplikasi kinerja
- Gambar 3.12. Rapat koordinasi fasilitasi pembuatan aplikasi Dindikpora
- Gambar 3.13. Bimtek pengelolaan data spasial di geoportal oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah
- Gambar 3.14. Rapat Bank Data
- Gambar 3.15. Rapat Tim Pengumpul data Kabupaten Temanggung
- Gambar 3.16. Keg. Self assesment tingkat keamanan informasi menggunakan indeks KAMI
- Gambar 3.17. Sosialisasi tentang Sertifikat elektornik
- Gambar 3.18. Distribusi anggaran menurut sasaran strategis Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020
- Gambar 3.19. Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Sisa Anggaran Dinkominfo Kabupaten Temanggung TA 2018-2020
- Gambar 3.20. Lampiran Surat Keputusan Komisi Inormasi Publik tentang Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020
- Gambar 3.21. Piagam Perhargaan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020
- Gambar 3.22. Piagam Penghargaan Pemingkatan Media Center Daerah Tingkat Nasional Tahun 2019 Kontribusi aktif dalam produksi foto pada portal berita infopublik.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. IKPD Tahun 2020
3. Evaluasi Renja Triwulan IV tahun 2020
4. Prestasi Perangkat Daerah
5. Rencana Aksi Perangkat Daerah
6. Cascading Kinerja
7. Pohon Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung (Dinkominfo) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinkominfo sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinkominfo Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Dinkominfo Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas pokok Dinkominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinkominfo menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- e. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- g. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
- h. Pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah;
- i. Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;
- j. Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup daerah;
- k. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- l. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;

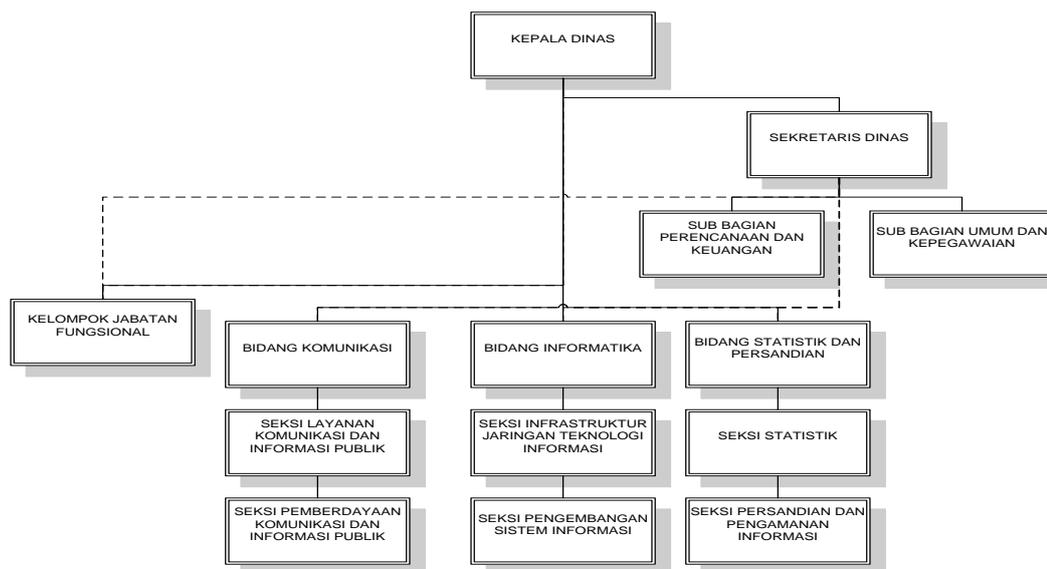
- m. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
- n. Pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- o. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- q. Penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangannya;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang, yang masing-masing membawahi 2 seksi, yaitu:
 - 1) Kepala Bidang Komunikasi, membawahi 2 seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik;
 - b) Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.
 - 2) Kepala Bidang Informatika, membawahi 2 seksi, yaitu:
 - a) Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi;
 - b) Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
 - 3) Kepala Bidang Statistik dan Persandian, membawahi 2 seksi, yaitu:
 - a) Seksi Statistik;
 - b) Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi.

Struktur Organisasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung digambarkan dalam bentuk bagan sebagaimana gambar sebagai berikut:



Gb.1.1.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfo Kab. Temanggung

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2		3	4
1	Kualifikasi Pendidikan			
	a.	SD	2	
	b.	SMP	0	
	c.	SMA	2	
	d.	Sarjana Muda (D-III)	7	
	e.	S-1 dan D-IV	13	
	f.	S-2	4	
	g.	S-3	-	
		Jumlah	28	
2	Pangkat/Golongan			
	a	Gol I	2	
	b	Gol II	7	
	c	Gol III	19	
	d	Gol IV	4	
		Jumlah	28	

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2		3	4
3	Jabatan/Eselon/Fungsional			
	a	Eselon II	1	
	b	Eselon III	4	
	c	Eselon IV	8	
	d	Eselon V	-	
	e	Jabatan Fungsional Khusus	7	
	f	Jabatan Fungsional Umum	8	
		Jumlah	28	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di atasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga pendukung (*supporting staff*) berjumlah 16 orang dengan latar belakang pendidikan S1, D3, D1 dan SMA dan tenaga kebersihan berjumlah 2 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, sehingga dapat mendukung kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Dinkominfo Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Tanah	-	-	
2	Peralatan dan Mesin	1.844	unit	
	Alat besar	12	unit	
	Alat angkutan	15	unit	
	Alat bengkel dan alat ukur	18	unit	
	Alat kantor dan rumah tangga	385	unit	
	Alat studio, komunikasi dan pemancar	421	unit	
	Alat persenjataan	1	unit	
	Komputer	991	unit	
	Alat keselamatan kerja	1	unit	
3	Gedung dan Bangunan	-	-	
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	
5	Aset lainnya (barang ekstrakomptabel)	477	unit	

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Temanggung

5. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi dan belum meratanya performansi infrastruktur jaringan di wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
3. Belum tersedianya infrastruktur backup sistem data center;
4. Perlu ditingkatkannya peran dan keaktifan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemberitaan dan penyampaian informasi ke masyarakat;
5. Belum optimalnya pengawasan dari masyarakat dalam rangka penyiaran informasi yang berkualitas;
6. Belum optimalnya ketersediaan dan updating data statistik sektoral;
7. Belum optimalnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

1. Indikator Makro Daerah

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nations Development Programme (UNDP) merekomendasikan bahwa martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*human development report 1990*). Dengan pentingnya pembangunan manusia tersebut maka hingga kini ukuran yang dijadikan keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki manusia, namun konsep ini pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial,

politik, budaya dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Metodologi perhitungan IPM terdiri dari komponen sebagai berikut:

a. Kependudukan

Data kependudukan yang berhubungan dengan perhitungan IPM yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio ketergantungan penduduk.

b. Kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menderita sakit yang secara langsung berpengaruh dengan aktifitas sehari-hari, selain itu juga data tentang jumlah kepemilikan jaminan. Aspek kesehatan dalam perhitungan IPM tercermin dari Angka Harapan Hidup.

c. Pendidikan

Aspek pendidikan dapat tercermin dari data persentase partisipasi sekolah, partisipasi sekolah dapat diukur dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka partisipasi Murni (APM).

d. Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang dijadikan parameter untuk mengukur perkembangan ekonomi dalam perhitungan IPM.

e. Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya adalah pengentasan kemiskinan. Sehingga tingkat kemiskinan menjadi salah satu parameter yang berpengaruh dalam perhitungan IPM.

f. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan menjadi penting dalam perhitungan IPM dikarenakan berkaitan langsung dengan kualitas manusia dalam bidang pekerjaan yang berujung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan manusia. Indikator IPM dibidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Persentase Penduduk menurut lapangan Usaha.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Temanggung diklasifikasikan dengan kategori sebagai berikut:

- Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebesar 69,57 masuk kedalam kategori sedang.

Tabel 1.3
Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

TAHUN	IPM
2015	67,07
2016	67,60
2017	68,34
2018	68,83
2019	69,56
2020	69,57

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami tren kenaikan, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Temanggung terus meningkat, aspek – aspek yang menjadi komponen penilaian ASPM yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan ketenagakerjaan secara umum meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih dalam kategori sedang.

2) Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai proses kenaikan harga barang secara umum dengan waktu yang terus menerus selama periode tertentu

(Nopirin, 1987:25). Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan stabil tidaknya nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakatpun akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Perkembangan laju inflasi dari tahun 2015 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2015	2,74	2,73	3,35
2016	2,42	2,36	3,02
2017	3,12	3,71	3,61
2018	2,89	2,82	3,13
2019	2,66	2,81	2,72
2020*	2,66	2,81	2,72

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

*) Data tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019

Angka inflasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 dalam perkembangannya cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi. Dalam satu dasawarsa terakhir, selaras juga dengan yang terjadi di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia, inflasi tertinggi di Kabupaten Temanggung terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,12 persen.

Adapun data yang tersaji untuk tahun 2020 merupakan data sementara, karena inflasi di tahun 2020 belum selesai perhitungannya.

3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Tabel 1.5
PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2015-2020

Tahun	ADHB		ADHK 2010	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2015	16.139.711,67	10,60	12.489.394,54	5,24
2016	17.548.930,01	8,73	13.116.363,64	5,02
2017	18.807.712,01	7,17	13.776.254,81	5,03
2018	20.254.482,86	7,69	14.483.255,21	5,13
2019	21.657.397,07	6,93	15.214.058,87	5,05
2020*	21.657.397,07	6,93	15.214.058,87	5,05

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

*) Data tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya, menggunakan angka PDRB atas dasar konstan

dikarenakan PDRB atas harga berlaku masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi). Penggunaan tahun dasar 2010 sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008), yaitu standar internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip ekonomi.

Pada tahun 2019 besaran PDRB menurut harga konstan di Kabupaten Temanggung secara agregat mencapai Rp. 15.214.058,87 juta. Angka sebesar itu menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya yang mencapai 14.483.255,21. Pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,05 persen, pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 5,13 persen.

Dari tabel diatas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut harga konstan terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 5,24 persen, sedangkan pertumbuhan terendah 5,02 persen terjadi pada tahun 2016.

Tabel 1.6
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2020

Tahun	Pertumbuhan ekonomi		
	Temanggung	Jateng	Nasional
2015	5,24	5,47	4,88
2016	5,02	5,27	5,03
2017	5,03	5,27	5,07
2018	5,13	5,32	5,17
2019	5,05	5,41	5,02
2020*	5,05	-2,65	-2,07

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

*) Data Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 untuk Kabupaten Temanggung masih sama dengan tahun 2019

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,41 persen tetapi lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Nasional yang tumbuh sebesar 5,02 persen.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 belum dapat disajikan dikarenakan perhitungan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh BPS Temanggung menggunakan data n-1 sehingga baru bisa diketahui di tahun 2021.

4) Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun (Sukirno, 2004). Cara mendapatkan besaran Pendapatan Per Kapita adalah dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. Meskipun belum secara pasti mencerminkan pemerataan, Pendapatan Per Kapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah khususnya tingkat kemakmuran penduduk secara makro.

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel 1.7. berikut ini:

Tabel 1.7
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

TAHUN	PDRB Per KAPITA ADHB	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2015	21.640.078,67	9,57
2016	23.321.271,11	7,77
2017	24.775.416,01	6,24
2018	26.455.905,95	6,78
2019	28.052.969,06	6,04
2020*	28.052.969,06	6,04

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

*) Data tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita diatas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung selalu mengalami peningkatan, secara makro dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung terus membaik, namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan sebenarnya karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang

dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebanyak 6,04% jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan terendah dalam kurun waktu 2015-2020.

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung di tahun 2020 belum dapat disajikan dikarenakan perhitungan Pendapatan Per Kapita yang dilakukan oleh BPS Temanggung menggunakan data n-1 sehingga baru bisa diketahui di tahun 2021.

5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (*International labour organization*). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung dari Tahun 2015-2020

TAHUN	TPT (%)	TPT JATENG	TPT NASIONAL
2015	1,5	4,99	6,18
2016	NA	4,53	5,61
2017	2,97	4,57	5,50
2018	3,24	4,51	5,34
2019	2,99	4,49	5,28
2020	3,85	6,48	5,28

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari tabel 1.8 diatas diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 tercatat sebesar 1,5 persen, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 2,97, ditahun 2018 mengalami peningkatan lagi menjadi 3,24 persen, mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 2,99 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 3,85. Artinya pada tahun 2020, diantara 100 penduduk temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 4 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

6) Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia menurut Kabupaten Kabupaten Temanggung

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional. Semakin merata distribusi pendapatan masyarakat disuatu negara/daerah maka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan, hal ini mencerminkan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di negara/daerah tersebut merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk (Bank Dunia). Untuk mengetahui distribusi pendapatan (ketimpangan pendapatan) suatu masyarakat dapat dihitung melalui perhitungan distribusi pengeluaran. Kriteria menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut (dalam Susenas BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020).

- 1) Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen;
- 2) Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada

- diantara 12 persen sampai dengan 17 persen; dan
- 3) Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di atas 17 persen.

Tabel 1.9
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Ketimpangan Rendah	-	-	16.56	18.34	18.39	18.39
2	Ketimpangan Sedang	-	-	36.50	36.52	34.61	34.61
3	Ketimpangan Tinggi	-	-	46.94	45.14	47.00	47.00

Sumber: Susenas BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020

*) Data tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019

Berdasarkan data di tabel diatas, bisa dilihat bahwa menurut kriteria Bank Dunia, kelompok masyarakat berpendapatan rendah di tahun 2019 sudah bisa dikatakan sejahtera dengan porsi pendapatan sejumlah 18,39 persen, akan tetapi porsi pendapatan yang mereka terima masih jauh dibawah kelompok berpenghasilan menengah yang menerima sejumlah 34,61 persen dari total pendapatan penduduk secara keseluruhan, dan jauh dibawah kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang mendapatkan porsi 47 persen.

2. Indikator Kinerja Utama

1) Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE.

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien,

efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) Domain Kebijakan Internal SPBE;
- 2) Domain Tata Kelola SPBE;
- 3) Domain Layanan SPBE.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 1.10 berikut:

Tabel 1.10.
Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Tabel 1.11.
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

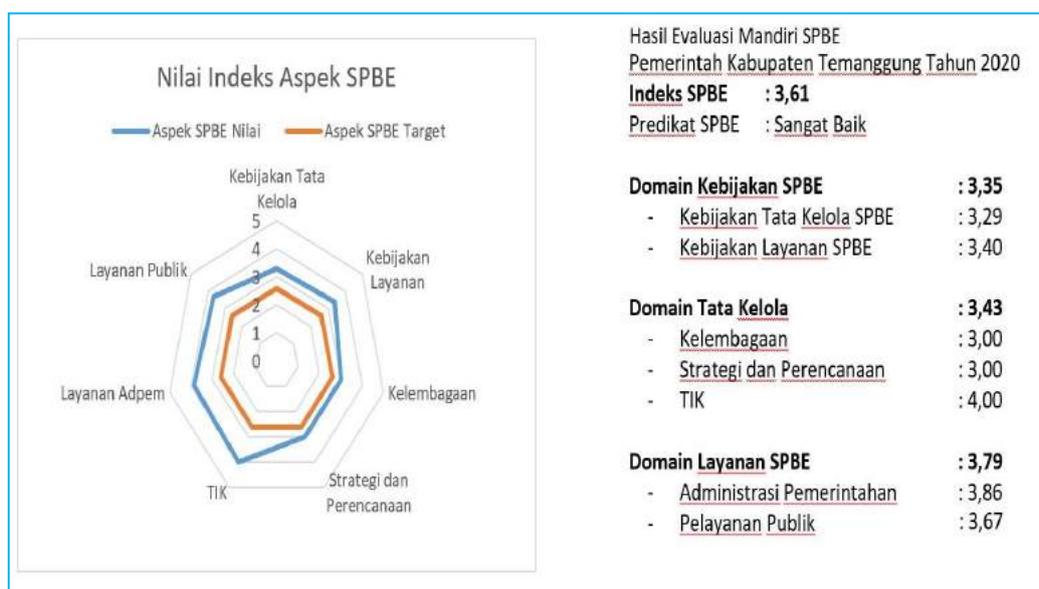
No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n.a	n.a	n.a	1,84	2,82	3,61

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2020

*) Data tahun 2020 berdasarkan data hasil evaluasi mandiri

Pada tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengadakan Evaluasi SPBE yang hanya pada 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tidak termasuk dalam 130 instansi tersebut,

sehingga hanya melakukan Evaluasi Mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Temanggung dengan hasil indeks SPBE sebesar 3,61.



Gambar 1.2.
Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Tahun 2020

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan, baik didomain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun layanan SPBE. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat, ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan metode:

1. Evaluasi dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
2. Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab;
3. Observasi lapangan, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pengamatan langsung.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

4. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
5. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
6. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator.

Tabel 1.12.
Domain, Aspek, dan Indikator Penilaian

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi
Domain 1	Kebijakan SPBE
Aspek 1	Kebijakan Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 2	Kebijakan Inovasi proses bisnis terintegrasi
Indikator 3	Kebijakan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 4	Kebijakan Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 5	Kebijakan Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 7	Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Aspek 2	Kebijakan Layanan SPBE
Indikator 8	Kebijakan Layanan Naskah Dinas
Indikator 9	Kebijakan Layanan Manajemen Kepegawaian

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi
Indikator 10	Kebijakan Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
Indikator 11	Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 12	Kebijakan Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 13	Kebijakan Layanan Pengadaan
Indikator 14	Kebijakan Layanan Pengaduan Publik
Indikator 15	Kebijakan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 16	Kebijakan Layanan <i>Whistle Blowing System</i>
Indikator 17	Kebijakan Layanan publik Instansi Pemerintah
Domain 2	Tata Kelola SPBE
Aspek 3	Kelembagaan
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 4	Strategi dan Perencanaan
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK
Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Domain 3	Layanan SPBE
Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31	Layanan Pengadaan
Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 34	Layanan <i>Whistle Blowing System</i>
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah

2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang

merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Pemeringkatan keterbukaan badan publik ini dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Pemerintah Kabupaten Temanggung terkait Keterbukaan Informasi Publik juga berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Tahapan pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri / SAQ (*Self Assesment Quessionaire*). Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:
 - Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;
 - Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;
 - Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
 - Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informatif;
 - Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informative.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai terbaik untuk dilanjutkan dengan visitasi verifikasi.

2) **Visitasi Verifikasi**

Visitasi verifikasi dilakukan kepada 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

3) **Uji Publik**

Badan Publik nominatif akan di undang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi dihadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan komitmen, program dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan keterbukaan Badan Publik serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis keterbukaan informasi.

4) **Penilaian Akhir**

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai. Dasar perhitungan peringkat adalah:

- Hasil evaluasi penilaian website;
- Hasil penilaian SAQ hasil verifikasi;
- Uji publik.

Tabel 1.13
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	63,23	70,09	70,8	77,9	80,03	95,5
2	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Berdasarkan Tabel 1.13 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu enam tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung dapat dikatakan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di pemerintah Kabupaten Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*.

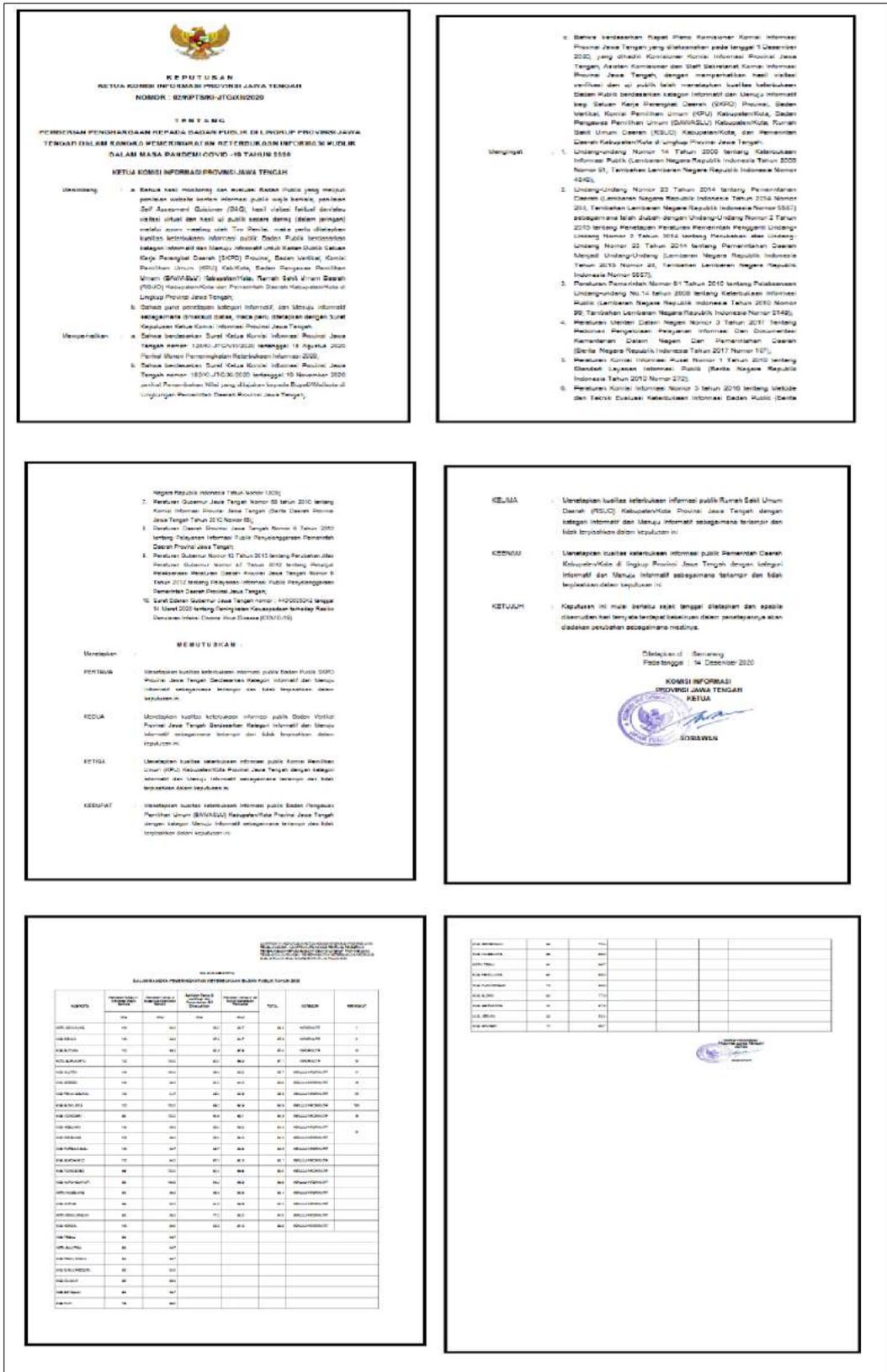
Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel berikut ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi kepada 19 (Sembilan Belas) kabupaten/kota yang mendapatkan nilai terbaik pada tahun 2020.

Tabel 1.14
Nilai Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2020

KAB/KOTA	Penilaian Tahap 1 / Informasi Wajib Berkala	Penilaian Tahap 2/ Kuesioner Penilaian Mandiri	Penilaian Tahap 3/ Verifikasi dan Penambahan SK Dikecualikan	Penilaian Tahap 4/ Uji Publik Penetapan Peringkat	TOTAL	KATEGORI	PERINGKAT
	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai			
KOTA SEMARANG	100	99.3	95.0	98.7	98.3	INFORMATIF	I
KAB. DEMAK	100	98.0	97.5	94.7	97.5	INFORMATIF	II
KAB. BATANG	100	99.3	92.5	97.8	97.4	INFORMATIF	III
KOTA SURAKARTA	100	100.0	90.0	98.3	97.1	INFORMATIF	IV
KAB. KLATEN	100	100.0	89.8	93.2	95.7	MENUJU INFORMATIF	V
KAB. BREBES	100	96.0	92.5	94.0	95.6	MENUJU INFORMATIF	VI
KAB. TEMANGGUNG	100	94.7	95.0	92.5	95.5	MENUJU INFORMATIF	VII
KAB. BANYUMAS	100	100.0	85.0	94.5	94.9	MENUJU INFORMATIF	VIII
KAB. WONOGIRI	90	100.0	94.8	93.1	94.5	MENUJU INFORMATIF	IX
KAB. KEBUMEN	100	99.3	85.0	93.0	94.3	MENUJU INFORMATIF	X
KAB. REMBANG	100	96.0	85.0	96.3	94.3	MENUJU INFORMATIF	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020



Gambar 1.3
Keputusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah tentang
Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2020

3. Indikator Kinerja Sasaran

1) Persentase PPID badan publik yang aktif

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID badan publik yang aktif yaitu PPID Pembantu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sesuai penilaian PPID Utama telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung.

PPID Pembantu Badan Publik adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tugas dan kewenangannya dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mengklasifikasikan informasi, meliputi:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
- b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- c) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
- d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;

- e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
- g) Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- h) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Yang dimaksud PPID aktif dalam hal ini adalah PPID Pembantu Badan Publik yang melaksanakan tugas dan kewenangannya secara sungguh-sungguh dengan indikator penilaian sebagai berikut:

- Mengumumkan Informasi Publik;
- Menyediakan Informasi Publik;
- Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Rumus memperoleh angka persentase PPID badan publik yang aktif yaitu Jumlah PPID aktif dibagi total badan publik dikali 100 %. Penilaian PPID Badan Publik yang aktif baru dilaksanakan mulai tahun 2017.

Realisasi persentase PPID badan publik yang aktif Kabupaten Temanggung tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table 1.15 berikut ini.

Tabel 1.15
Persentase PPID Pembantu Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPID badan publik yang aktif	Belum ada pemeringkatan	Belum ada pemeringkatan	5	26	38	45
2	Jumlah PPID badan publik	335	335	335	335	335	341
3	Persentase PPID badan publik yang aktif	Belum ada pemeringkatan	Belum ada pemeringkatan	1,4%	7,3%	11,34%	13,20%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Berdasarkan Tabel 1.15 dapat dilihat bahwa persentase PPID badan publik yang aktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, namun demikian masih terbilang kecil. Hal ini dikarenakan masih belum kuatnya kesadaran ditingkat PPID Pembantu Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian prosentase keaktifan ini adalah sejalan dengan upaya untuk meningkatkan nilai keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel 1.16 memperlihatkan keaktifan PPID Pembantu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Tabel 1.16
Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah Kabupaten
Temanggung

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Sekretaris DPRD	-	Aktif	Aktif	Aktif
2	Dinas Kesehatan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
3	Dinas Pendidikan	-	-	-	Aktif
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Aktif	Aktif	Aktif
5	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	Aktif	Aktif	Aktif
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	-	Aktif	Aktif	Aktif
8	Dinas Pertanian Dan Pangan	-	Aktif	Aktif	Aktif
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	Aktif	Aktif
10	Dinas Tenaga Kerja	-	-	Aktif	Aktif
11	Dinas Sosial	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
13	Dinas Perikanan Dan Peternakan	-	Aktif	Aktif	Aktif
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
	Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak				
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	Aktif	Aktif	Aktif
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	Aktif	Aktif	Aktif
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	Aktif	Aktif	Aktif
19	Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	Aktif	Aktif	Aktif
20	Inspektorat	-	Aktif	Aktif	Aktif
21	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
23	Badan Kepegawaian Pengembangan Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif
24	Rumah Sakit Umum Kab. Temanggung	-	Aktif	Aktif	Aktif
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif
26	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	-	-	Aktif	Aktif
27	Kecamatan Temanggung	-	-	-	-
28	Kecamatan Tembarak	-	-	Aktif	Aktif
29	Kecamatan Pringsurat	-	-	Aktif	Aktif
30	Kecamatan Kaloran	-	Aktif	Aktif	Aktif
31	Kecamatan Kranggan	-	-	-	-
32	Kecamatan Parakan	-	-	Aktif	Aktif
33	Kecamatan Kedu	-	-	Aktif	Aktif
34	Kecamatan Bulu	-	Aktif	Aktif	Aktif
35	Kecamatan Kandangan	-	-	Aktif	Aktif
36	Kecamatan Candiroti	-	-	Aktif	Aktif
37	Kecamatan Jumo	-	-	-	-
38	Kecamatan Wonobojo	-	Aktif	Aktif	Aktif
39	Kecamatan Ngadirejo	-	Aktif	Aktif	Aktif
40	Kecamatan Bejen	-	-	Aktif	Aktif
41	Kecamatan Tretep	-	Aktif	Aktif	Aktif
42	Kecamatan Kledung	-	Aktif	Aktif	Aktif
43	Kecamatan Selopampang	-	-	-	-
44	Kecamatan Tlogomulyo	-	-	Aktif	Aktif
45	Kecamatan Gemawang	-	-	-	-
46	Kecamatan Bansari	-	-	Aktif	Aktif
47	Kelurahan Temanggung I	-	-	-	-
48	Kelurahan Temanggung II	-	-	-	-
49	Kelurahan Butuh	-	-	-	-
50	Kelurahan Jampiroso	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
51	Kelurahan Jampirejo	-	-	-	-
52	Kelurahan Kertosari	-	-	-	-
53	Kelurahan Banyuurip	-	-	-	-
54	Kelurahan Kowangan	-	-	-	-
55	Kelurahan Jurang	-	-	-	-
56	Kelurahan Sidorejo	-	-	-	-
57	Kelurahan Walitelon utara	-	-	-	-
58	Kelurahan Walitelon selatan	-	-	-	-
59	Kelurahan Tlogorejo	-	-	-	-
60	Kelurahan Manding	-	-	-	-
61	Kelurahan Kebonsari	-	-	-	-
62	Kelurahan Mungseng	-	-	-	-
63	Kelurahan Purworejo	-	-	-	-
64	Kelurahan Giyanti	-	-	-	-
65	Kelurahan Madureso	-	-	-	-
66	Kelurahan Kranggan	-	-	-	-
67	Kelurahan Parakan wetan	-	-	-	-
68	Kelurahan Parakan kauman	-	-	-	-
69	Kelurahan Manggong	-	-	-	-
70	Desa Joho	-	-	-	Aktif
71	Desa Guntur	-	-	-	-
72	Desa Lungge	-	-	-	Aktif
73	Desa Mudal	-	-	-	-
74	Desa Gilingsari	-	-	-	-
75	Desa Nampirejo	-	-	-	-
76	Desa Tlogomulyo	-	-	-	-
77	Desa Candisari	-	-	-	-
78	Desa Sriwungu	-	-	-	-
79	Desa Langgeng	-	-	-	-
80	Desa Tanjungsari	-	-	-	-
81	Desa Losari	-	-	-	-
82	Desa Balerejo	-	-	-	-
83	Desa Kerokan	-	-	-	-
84	Desa Legoksari	-	-	-	-
85	Desa Tlilir	-	-	-	-
86	Desa Gedegan	-	-	-	-
87	Desa Pagersari	-	-	-	-
88	Desa Badran	-	-	-	-
89	Desa Bengkal	-	-	-	-
90	Desa Pare	-	-	-	-
91	Desa Nguwet	-	-	-	-
92	Desa Ngropoh	-	-	-	-
93	Desa Pindowo	-	-	-	-
94	Desa Sanggrahan	-	-	-	-
95	Desa Klepu	-	-	-	-
96	Desa Kemloko	-	-	-	-
97	Desa Gentan	-	-	-	-
98	Desa Kramat	-	-	-	-
99	Desa Purwosari	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
100	Desa Tembarak	-	-	-	-
101	Desa Menggoro	-	-	-	-
102	Desa Purwodadi	-	-	-	-
103	Desa Wonokerso	-	-	-	-
104	Desa Kemloko	-	-	-	-
105	Desa Gandu	-	-	-	-
106	Desa Botoputih	-	-	-	-
107	Desa Tawang Sari	-	-	-	-
108	Desa Greges	-	-	-	-
109	Desa Krajan	-	-	-	-
110	Desa Jragan	-	-	-	-
111	Desa Drono	-	-	-	-
112	Desa Banaran	-	-	-	-
113	Desa Selopampang	-	-	-	-
114	Desa Tanggulanom	-	-	-	-
115	Desa Jetis	-	-	-	-
116	Desa Salamrejo	-	-	-	-
117	Desa Ngaditirto	-	-	-	-
118	Desa Bulan	-	-	-	-
119	Desa Kacepit	-	-	-	-
120	Desa Gambasan	-	-	-	-
121	Desa Bumiayu	-	-	-	-
122	Desa Kebonagung	-	-	-	-
123	Desa Bagus	-	-	-	-
124	Desa Plumbon	-	-	-	-
125	Desa Pringsurat	-	-	-	-
126	Desa Kebumen	-	-	-	-
127	Desa Soropadan	-	-	-	-
128	Desa Kupon	-	-	-	Aktif
129	Desa Karangwuni	-	-	-	-
130	Desa Gowak	-	-	-	-
131	Desa Rejosari	-	-	-	-
132	Desa Pingit	-	-	-	-
133	Desa Klepu	-	-	-	-
134	Desa Soborejo	-	-	-	-
135	Desa Nglorok	-	-	-	-
136	Desa Pagergunung	-	-	-	-
137	Desa Wonokerso	-	-	-	-
138	Desa Ngipik	-	-	-	-
139	Desa Kaloran	-	-	-	-
140	Desa Tlogowungu	-	-	-	Aktif
141	Desa Gandon	-	-	-	-
142	Desa Tleter	-	-	-	-
143	Desa Getas	-	-	-	-
144	Desa Kalimanggis	-	-	-	-
145	Desa Tempuran	-	-	-	-
146	Desa Kemiri	-	-	-	-
147	Desa Geblog	-	-	-	-
148	Desa Tegowanuh	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
149	Desa Keblukan	-	-	-	-
150	Desa Tepusen	-	-	-	-
151	Desa Gandulan	-	-	-	-
152	Desa Kwarakan	-	-	-	-
153	Desa Campursalam	-	-	-	-
154	Desa Wanutengah	-	-	-	-
155	Desa Nglondong	-	-	-	-
156	Desa Bagus	-	-	-	-
157	Desa Dangkel	-	-	-	-
158	Desa Mandisari	-	-	-	-
159	Desa Tegalroso	-	-	-	-
160	Desa Traji	-	-	-	-
161	Desa Watukumpul	-	-	-	-
162	Desa Ringinanom	-	-	-	-
163	Desa Depakharjo	-	-	-	-
164	Desa Caturanom	-	-	-	-
165	Desa Gelapansari	-	-	-	-
166	Desa Sunggingsari	-	-	-	-
167	Desa Bansari	-	-	-	-
168	Desa Mojosari	-	-	-	-
169	Desa Rejosari	-	-	-	-
170	Desa Gunungsari	-	-	-	-
171	Desa Balesari	-	-	-	-
172	Desa Purborejo	-	-	-	-
173	Desa Tlogowero	-	-	-	-
174	Desa Mranggen Kidul	-	-	-	-
175	Desa Mranggen Tengah	-	-	-	-
176	Desa Candisari	-	-	-	-
177	Desa Campuranom	-	-	-	-
178	Desa Gentingsari	-	-	-	-
179	Desa Tanurejo	-	-	-	-
180	Desa Kledung	-	-	-	-
181	Desa Kalirejo	-	-	-	-
182	Desa Paponan	-	-	-	-
183	Desa Jeketro	-	-	-	-
184	Desa Kwadungan Gunung	-	-	-	-
185	Desa Kwadungan Jurang	-	-	-	-
186	Desa Tlahap	-	-	-	-
187	Desa Petarangan	-	-	-	-
188	Desa Canggal	-	-	-	-
189	Desa Jambu	-	-	-	-
190	Desa Kruwisan	-	-	-	-
191	Desa Tuksari	-	-	-	-
192	Desa Kedu	-	-	-	-
193	Desa Candimulyo	-	-	-	-
194	Desa Salamsari	-	-	-	-
195	Desa Danurejo	-	-	-	-
196	Desa Mojotengah	-	-	-	-
197	Desa Karangtejo	-	-	-	-

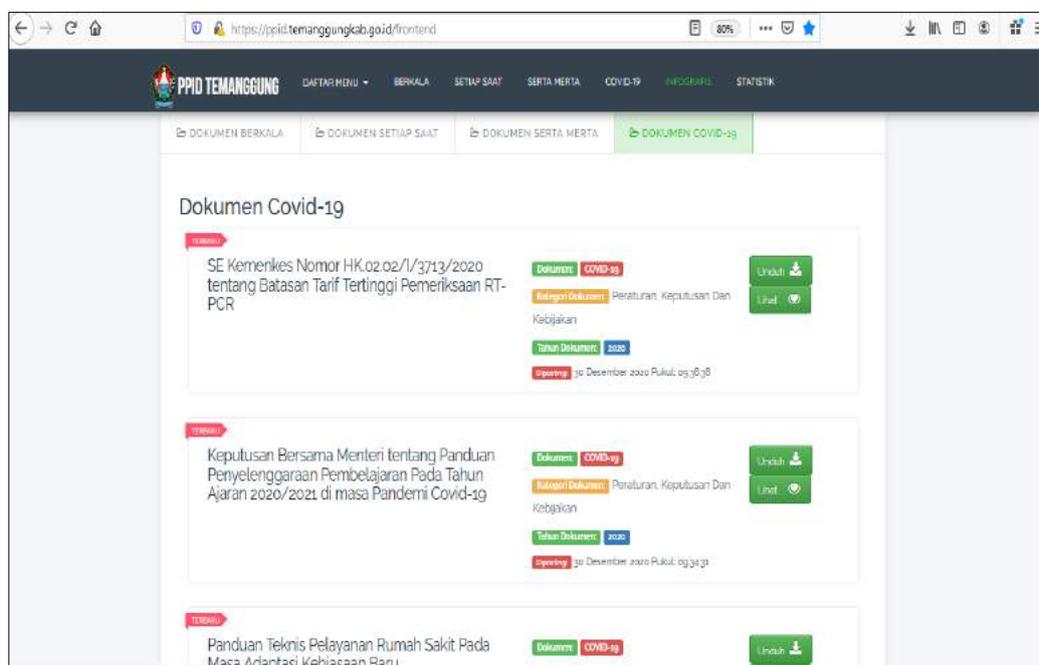
No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
198	Desa Mergowati	-	-	-	-
199	Desa Kutoanyar	-	-	-	-
200	Desa Kundisari	-	-	-	-
201	Desa Ngadimulyo	-	-	-	-
202	Desa Gondangwayang	-	-	-	-
203	Desa Bandunggede	-	-	-	-
204	Desa Tegalsari	-	-	-	-
205	Desa Bojonegoro	-	-	-	-
206	Desa Bulu	-	-	-	-
207	Desa Tegalurung	-	-	-	-
208	Desa Campursari	-	-	-	-
209	Desa Gandurejo	-	-	-	-
210	Desa Gondosuli	-	-	-	-
211	Desa Ngimbrang	-	-	-	-
212	Desa Putat	-	-	-	-
213	Desa Danupayan	-	-	-	-
214	Desa Mondoretno	-	-	-	-
215	Desa Pandemulyo	-	-	-	Aktif
216	Desa Pasuruhan	-	-	-	-
217	Desa Pakurejo	-	-	-	-
218	Desa Tegalrejo	-	-	-	-
219	Desa Malangsari	-	-	-	-
220	Desa Pagergunung	-	-	-	-
221	Desa Wonosari	-	-	-	-
222	Desa Bansari	-	-	-	-
223	Desa Wonotirto	-	-	-	-
224	Desa Pengilon	-	-	-	-
225	Desa Kandangan	-	-	-	-
226	Desa Baledu	-	-	-	-
227	Desa Caruban	-	-	-	-
228	Desa Wadas	-	-	-	-
229	Desa Samiranan	-	-	-	-
230	Desa Ngemplak	-	-	-	Aktif
231	Desa Kembang Sari	-	-	-	-
232	Desa Gesing	-	-	-	-
233	Desa Margolelo	-	-	-	-
234	Desa Blimbing	-	-	-	-
235	Desa Kedungumpul	-	-	-	-
236	Desa Rowo	-	-	-	-
237	Desa Malebo	-	-	-	-
238	Desa Tlogopucang	-	-	-	-
239	Desa Kedawung	-	-	-	-
240	Desa Banjarsari	-	-	-	-
241	Desa Candirotto	-	-	-	-
242	Desa Lampuyang	-	-	-	-
243	Desa Canggal	-	-	-	-
244	Desa Kentengsari	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
245	Desa Ngabeyan	-	-	-	-
246	Desa Bantir	-	-	-	-
247	Desa Krawitan	-	-	-	-
248	Desa Muntung	-	-	-	-
249	Desa Batusari	-	-	-	-
250	Desa Mento	-	-	-	-
251	Desa Muneng	-	-	-	-
252	Desa Plosogaden	-	-	-	-
253	Desa Sidoharjo	-	-	-	-
254	Desa Gunungpayung	-	-	-	-
255	Desa Bejen	-	-	-	-
256	Desa Banjarsari	-	-	-	-
257	Desa Jlegong	-	-	-	-
258	Desa Prangkakan	-	-	-	-
259	Desa Lowungu	-	-	-	-
260	Desa Larangan Luwok	-	-	-	-
261	Desa Congkrang	-	-	-	-
262	Desa Kebondalem	-	-	-	-
263	Desa Kemuning	-	-	-	-
264	Desa Selosabrang	-	-	-	-
265	Desa Tanjungsari	-	-	-	-
266	Desa Petung	-	-	-	-
267	Desa Duren	-	-	-	-
268	Desa Ngaliyan	-	-	-	-
269	Desa Jumo	-	-	-	-
270	Desa Jamusan	-	-	-	-
271	Desa Kertosari	-	-	-	-
272	Desa Giyono	-	-	-	-
273	Desa Gununggempol	-	-	-	-
274	Desa Padureso	-	-	-	-
275	Desa Barang	-	-	-	-
276	Desa Jombor	-	-	-	-
277	Desa Ketitang	-	-	-	-
278	Desa Morobongo	-	-	-	-
279	Desa Karangtejo	-	-	-	-
280	Desa Sukomarto	-	-	-	-
281	Desa Gedongsari	-	-	-	-
282	Desa Gemawang	-	-	-	-
283	Desa Muncar	-	-	-	-
284	Desa Kemiriombo	-	-	-	-
285	Desa Ngadisepi	-	-	-	-
286	Desa Krempong	-	-	-	-
287	Desa Sucen	-	-	-	-
288	Desa Karangseneng	-	-	-	-
289	Desa Banaran	-	-	-	-
290	Desa Kalibanger	-	-	-	-
291	Desa Jambon	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
292	Desa Tretep	-	-	-	-
293	Desa Donorojo	-	-	-	-
294	Desa Nglarangan	-	-	-	-
295	Desa Sigedong	-	-	-	-
296	Desa Bonjor	-	-	-	-
297	Desa Tempelsari	-	-	-	-
298	Desa Campurejo	-	-	-	-
299	Desa Bojong	-	-	-	-
300	Desa Bandungan	-	-	-	-
301	Desa Simpar	-	-	-	-
302	Desa Tlogo	-	-	-	-
303	Desa Wonoboyo	-	-	-	-
304	Desa Pateken	-	-	-	-
305	Desa Pitrosari	-	-	-	-
306	Desa Purwosari	-	-	-	-
307	Desa Kebonsari	-	-	-	-
308	Desa Semen	-	-	-	-
309	Desa Tening	-	-	-	-
310	Desa Wonocoyo	-	-	-	-
311	Desa Pesantren	-	-	-	-
312	Desa Rejosari	-	-	-	-
313	Desa Tawang Sari	-	-	-	-
314	Desa Wates	-	-	-	-
315	Desa Cemoro	-	-	-	-
316	Desa Ngadirejo	-	-	-	-
317	Desa Gondang Winangun	-	-	-	-
318	Desa Ganduwetan	-	-	-	-
319	Desa Ngaren	-	-	-	-
320	Desa Mangunsari	-	-	-	-
321	Desa Dlimoyo	-	-	-	-
322	Desa Purbosari	-	-	-	-
323	Desa Campursari	-	-	-	-
324	Desa Tegalrejo	-	-	-	-
325	Desa Giripurno	-	-	-	-
326	Desa Katekan	-	-	-	-
327	Desa Banjarsari	-	-	-	-
328	Desa Medari	-	-	-	-
329	Desa Karanggedong	-	-	-	-
330	Desa Munggangsari	-	-	-	-
331	Desa Katahan	-	-	-	-
332	Desa Petirejo	-	-	-	-
333	Desa Pringapus	-	-	-	-
334	Desa Gejagan	-	-	-	-
335	Desa Batusari	-	-	-	-
336	PDAM Tirta Agung	-	-	-	-
337	PD BPR Bank Pasar	-	-	-	-
338	PD Apotik Waringin Mulyo	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
339	PD BPR BKK Temanggung	-	-	-	-
340	PD Aneka Usaha	-	-	-	-
341	PD Bhumi Phala Wisata	-	-	-	-
Jumlah PPID Aktif		5	26	38	45

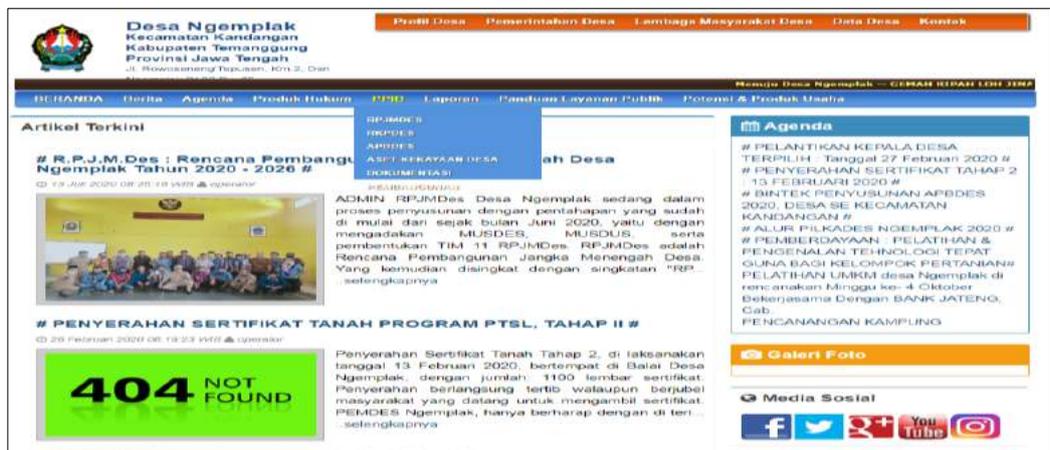
Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020



Gambar 1.4
Tampilan Layar Website PPID Kabupaten Temanggung



Gambar 1.5.
Website PPID Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah/Kecamatan



Gambar 1.6.
Website PPID Badan Publik Kelurahan/Desa



Gambar 1.7.
Website PPID Badan Publik Badan Usaha Milik Daerah

2) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan peran serta diseminasi kepada masyarakat KIM berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Indikator keaktifan KIM adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat atau dijabarkan sebagai berikut:

- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya; menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa

Untuk memperoleh angka persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif dapat menggunakan rumus jumlah KIM yang aktif/jumlah KIM yang terbentuk x 100%.

Realisasi persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.17 berikut ini.

Tabel 1.17
Persentase KIM Aktif Kab. Temanggung Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	n.a	1	2	5	5
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat	n.a	n.a	19	32	32	32
3	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	n.a	3,2%	6,25%	15,63%	15,63%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

*Data tahun 2020 samadengan data tahun 2019

Berdasarkan Pada Tahun 2020, tidak ada jumlah penambahan KIM yang terbentuk maupun KIM yang aktif. Hal ini dikarenakan anggaran yang diperuntukkan untuk pembentukan dan pendampingan KIM terkena refocusing. Dinas Kominfo sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) untuk mendorong agar desa dapat menganggarkan pemberdayaan KIM ini di APBDes maupun alokasi Dana Desa.

KIM yang sudah dibentuk diwadahi dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, merupakan KIM yang bersifat kewilayahan, yaitu tingkat desa. Selain membentuk dan memperkuat KIM yang bersifat kewilayahan, kedepan Dinkominfo juga berencana untuk membentuk dan melaksanakan pendampingan terhadap komunitas-komunitas yang sudah terbentuk di masyarakat. KIM yang dibentuk belum seluruhnya aktif seperti yang diharapkan dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a) SDM pelaku KIM yang beragam, khususnya dalam penguasaan Teknologi Informasi Komunikasi dan literasi media, hal ini

memerlukan pendampingan berupa pelatihan dan bimbingan teknis yang terukur dan komprehensif;

- b) Pendampingan yang dilakukan oleh Dinkominfo dirasa masih belum optimal, karena keterbatasan anggaran dan SDM, sehingga diperlukan sinergi dan peran aktif dari para pelaku KIM

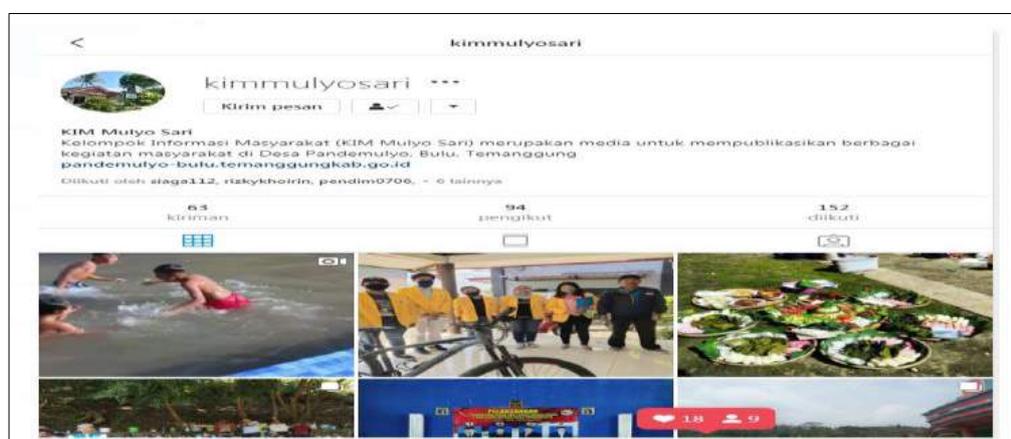
Pola Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan keaktifan KIM adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, sarasehan, diskusi, workshop dan bimtek, dengan materi yang bersifat teknis maupun peningkatan kesadaran anggota dan masyarakat terhadap literasi informasi. Adapun KIM yang sudah dibentuk disajikan pada Tabel 1.18 berikut ini.

Tabel 1.18
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab. Temanggung

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBENTUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	Kayana	Desa Danupayan Kec. Bulu	2017	✓	
2	Tegalurung	Desa Tegalurung Kec. Bulu	2017		✓
3	Almond	Desa Mondoretno Kec. Bulu	2017	✓	
4	Sari Makmur	Desa Campursari, Kec. Bulu	2017		✓
5	Sebid	Desa Putat, Kec. Bulu	2017		✓
6	Bansari	Desa Bansari Kec. Bulu	2017		✓
7	Pandemulyo	Desa Pandemulyo Kec. Bulu	2017	✓	
8	Ngudi Sari	Desa Malangsari Kec. Bulu	2017		✓
9	Pengilon	Desa Pengilon Kec. Bulu	2017		✓
10	Loh Jinawi	Desa Gandurejo Kec. Bulu	2017		✓
11	Prasasti	Desa Gondosuli Kec. Bulu	2017		✓
12	Cinta Ngimbrang	Desa Ngimbrang Kec. Bulu	2017		✓
13	Madani	Desa Pagergunung Kec. Bulu	2017		✓
14	KIM Pakurejo	Desa Pakurejo Kec. Bulu	2017		✓
15	De Pasthi	Desa Pasuruhan Kec. Bulu	2017		✓
16	KIM Tegalrejo	Desa Tegalrejo Kec. Bulu	2017		✓
17	Tirto Meteor	Desa Wonotirto Kec. Bulu	2017		✓
18	Wonosari	Desa Wonosari Kec. Bulu	2017		✓
19	Bulu Jaya	Desa Bulu Kec. Bulu	2017	✓	
20	Maju Makmur	Desa Karangtejo Kec. Jumo	2018		✓
21	Bersama	Desa Jombor Kec. Jumo	2018		✓
22	Jaya Utama	Desa Jamusan Kec. Jumo	2018		✓
23	Tentrem	Desa Sukomarto Kec. Jumo	2018		✓
24	Legowo	Desa GiyonoKec. Jumo	2018	✓	
25	Podo Maju	Desa MorobongoKec. Jumo	2018		✓
26	Taruna Bhakti	Desa Barang Kec. Jumo	2018		✓
27	Manggala	Desa Gununggempol Kec. Jumo	2018		✓
28	Berlian	Desa Padureso Kec. Jumo	2018		✓
29	Lancar Jaya	Desa Kertosari Kec. Jumo	2018		✓

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBENTUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
30	Damai Sejahtera	Desa Ketitang Kec. Jumo	2018		✓
31	Sido Dadi	Desa Gedongsari Kec. Jumo	2018		✓
32	Adipati Sindurejo	Desa Jumo Kec. Jumo	2018		✓
Jumlah				5	27

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020



Gambar 1.8.
Media Komunikasi KIM Tingkat Desa

3) Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Terhadap Norma Siaran

LP (Lembaga Penyiaran) terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi, yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya, melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut.

Kepatuhan Lembaga Penyiaran terhadap norma siaran adalah pelaksanaan regulasi tentang penyiaran dan norma siaran oleh lembaga penyiaran, baik publik, swasta maupun komunitas di Kabupaten Temanggung. Adapun Norma Siaran mengacu pada:

- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
- Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Kode etik penyiaran adalah suatu sistem norma maupun aturan profesional secara tertulis dan menyatakan nilai – nilai yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan tidak baik. Di Indonesia kode

etik penyiaran berdasarkan pada aturan perundang-undangan dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Persentase kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran diukur dengan jumlah aduan/jumlah pelanggaran yang dapat ditangani dan kemudian ditindaklanjuti.

Adapun rumus yang digunakan adalah: jumlah aduan tertangani dibagi jumlah aduan dikali 100%. Apabila dalam tahun tertentu tidak ada aduan, maka capaiannya dianggap 100%.

Realisasi Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.19 sebagai berikut:

Tabel 1.19
Persentase Kepatuhan LPP Terhadap Norma Siaran Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang patuh	7	7	8	8	8	8
2	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	7	7	8	8	8	8
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Dari Tabel 1.19 dapat dilihat bahwa persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%, artinya setiap ada pengaduan selalu dapat ditindak lanjuti dan tidak ditemukan pelanggaran kode etik atau norma siaran.

Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat total 8 Lembaga Penyiaran Publik, terdiri dari 5 Radio Swasta, 1 Radio Komunitas, 1 Radio Publik Lokal, 1 Televisi Publik Lokal yang secara lengkap disajikan pada Tabel 1.20.

Tabel 1.20
LPP di Kabupaten Temanggung

NO	NAMA LPP	ALAMAT	FREK	STATUS KEPATUHAN
1	Radio Erte FM	Jl. Gerilya Kowangan, Temanggung	94.8 Mhz	Patuh
2	Radio Angkasa 7	JL. Gilingsari Kav. 2-3 Tegaltemu Manding, Temanggung	88.1 Mhz	Patuh
3	Radio O2	Jl. Jenderal Sudirman No.164, Rejosari, Kowangan, Temanggung	98.1 MHz	Patuh
4	Radio Ofa	Komplek Wisma Soemodilogo, Kranggan, Temanggung	101.5 MHz	Patuh
5	Radio Best/Pop FM	Jl. Randusari No. 5 Temanggung	103.1 MHz	Patuh
6	Radio Shofar	Jl. Soepono No. 11 Temanggung	107.7 MHz	Patuh
7	Radio Santika	Jl. Jenderal Sudirman No. 60, Jampirejo barat, Jampirejo, Temanggung	96.4 FM	Patuh
8	Temanggung TV	Jl. S. Kadar Maron No.21, Sawah & Hutan, Kedungumpul, Kandangan, Temanggung	3970.8/H/ 03000	Patuh

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Dalam rangka pengawasan isi siaran masyarakat dapat melaksanakan secara langsung dan melaporkan kepada Dinkominfo atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguatkan peran pengawasan isi siaran ini, KPID Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinkominfo membentuk kelompok masyarakat pemantau isi siaran dengan beranggotakan organisasi masyarakat, unsur mahasiswa dan birokrasi.

Tingkat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat dan serius, apabila ada hanya pelanggaran yang bersifat ringan terkait konten siaran yang langsung ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan.

4) Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik

Ruang publik (area publik) adalah kawasan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Lokasi area publik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinkominfo.

Rumus untuk menghitung Persentase ketersediaan akses internet publik yaitu Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi akses internet dibagi Jumlah area publik dikali 100%.

Sampai dengan awal tahun 2020 ini tercatat ada 60 area publik yang menjadi urusan Dinkominfo dalam pemenuhan kebutuhan akses internet. Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi jaringan internet publik dari Dinkominfo dengan kecepatan 2 mbps dedicated mulai tahun 2015 s.d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.21
Area publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi akses internet	-	6	7	25	41	44
2	Jumlah area publik	25	25	25	60	60	60
3	Persentase ketersediaan akses internet publik	0	24	28	41,6	68,3	73,33

Saat ini jumlah area publik yang telah difasilitas akses internet gratis 44 titik. Penambahan sebesar 3 titik dari tahun sebelumnya ditempatkan pada pasar Parakan lantai 1 dan puskesmas Banjarsari Ngadirejo. Terjadinya pandemi covid-19 selama tahun 2020 beberapa wifi di area publik dimatikan untuk menghindari adanya masyarakat yang berkerumun di sekitaran area hotspot yaitu sejak bulan Maret hingga bulan Agustus.

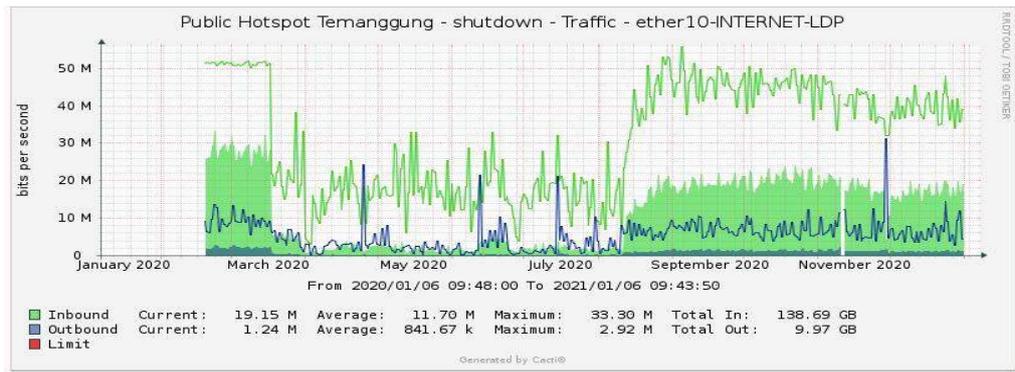
Tabel 1.22
Lokasi area publik Kabupaten Temanggung s.d tahun 2020

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
1	Halaman Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	2016	2016	Aktif
2	Areal pusat Komunitas kreatif	2016	2016	Aktif
3	Alun-Alun	2016	2016	Aktif
4	Taman Pengayoman	2016	2016	Aktif
5	Area Pendopo Jenar	2016	2016	Aktif
6	Area Setda	2016	2016	Aktif
7	Pikatan Waterpark	2017	2017	Aktif
8	Taman Kali Progo	2018	2018	Aktif
9	Pujasera	2018	2018	Aktif
10	Taman kartini	2016	2016	Aktif
11	Tirto Asri Water splash	2018	2018	Aktif
12	Hutan Kota Gumuk Lintang	2018	2018	Aktif
13	City Walk (tugu jam)	2018	2018	Aktif
14	Pasar Kliwon	2018	2018	Aktif
15	Plaza (Pasar Temanggung Permai)	2018	2018	Aktif
16	Area Kuliner Samping DPRD	2018	2018	Aktif
17	Majid Agung Darussalam	2018	2018	Aktif
18	Citywalk Depan Diskominfo	2018	2018	Aktif
19	Citywalk Depan Kecamatan Temanggung	2018	2018	Aktif
20	Area RSUD Djoyonegoro	2018	2018	Aktif
21	Area Lapangan TV Temanggung	2018	2018	Aktif
22	Area Pasar Burung Kerkop	2018	2018	Aktif
23	Terminal Temanggung	2018	2018	Aktif
24	GOR Bambu Runcing	2018	2018	Aktif
25	Komplek Stadion	2018	2018	Aktif
26	Citywalk depan kantor NU	2019	2019	Aktif
27	Citywalk depan warung jadul	2019	2019	Aktif
28	RSUD timur bagian dalam	2019		
29	RSUD barat ruang tunggu	2019		
30	Ruang pelayanan Dindikcapil	2019	2019	Aktif
31	Taman Bambu Runcing	2019	2019	Aktif
32	Pasar Parakan1 - selatan lantai 1	2019	2020	Aktif
33	Pasar Parakan2 - utara lantai 1	2019	2020	Aktif
34	Pasar Parakan3 - selatan lantai 1	2019		
35	Pasar Parakan4 - selatan lantai 2	2019		
36	Ruang tunggu Puskesmas Temanggung	2019	2019	Aktif
37	Ruang tunggu Puskesmas Tlogomulyo	2019		
38	Ruang tunggu Puskesmas Tembarak	2019		

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
39	Ruang tunggu Puskesmas Selopampang	2019		
40	Ruang tunggu Puskesmas Pringsurat	2019		
41	Ruang tunggu Puskesmas Rejosari	2019	2019	Aktif
42	Ruang tunggu Puskesmas Kranggan	2019		
43	Ruang tunggu Puskesmas Banjarsari	2019	2019	Aktif
44	Ruang tunggu Puskesmas Parakan	2019	2019	Aktif
45	Ruang tunggu Puskesmas Traji	2019		
46	Ruang tunggu Puskesmas Bulu	2019	2019	Aktif
47	Ruang tunggu Puskesmas Ngadirejo	2019		
48	Ruang tunggu Puskesmas Kaloran	2019		
49	Ruang tunggu Puskesmas Tepusen	2019		
50	Ruang tunggu Puskesmas Candiroto	2019		
51	Ruang tunggu Puskesmas Bejen	2019		
52	Ruang tunggu Puskesmas Bansari	2019	2019	Aktif
53	Ruang tunggu Puskesmas Wonobojo	2019		
54	Ruang tunggu Puskesmas Tretep	2019	2019	Aktif
55	Ruang tunggu Puskesmas Kedu	2019	2019	Aktif
56	Ruang tunggu Puskesmas Kledung	2019	2019	Aktif
57	Ruang tunggu Puskesmas Kandangan	2019	2019	Aktif
58	Ruang tunggu Puskesmas Jumo	2019		
59	Ruang tunggu Puskesmas Gemawang	2019	2019	Aktif
60	Ruang tunggu Puskesmas Dharmarini	2019	2019	Aktif
	Jumlah	60	60	44

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Layanan internet publik meskipun selama 6 (enam) bulan dimatikan namun tetap banyak diminati selama masa pandemi dengan limitasi per titik adalah 2 Mbps untuk mengurangi tingkat kerumunan. Hingga akhir tahun 2020, penggunaan bandwidth untuk seluruh area mencapai titik maksimal 33.30 Mbps sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.8 tentang grafik okupansi bandwidth internet publik.



Gambar 1.9.
Grafik Okupansi Bandwidth Internet Publik

5) Persentase Ketersediaan Jaringan Internet

Jaringan Internet sebagai sebuah sistem adalah Sistem jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data seperti remote login, transfer file, surat elektronik, World Wide Web dan newsgroup. Ketersediaan jaringan internet merupakan kebutuhan dasar komunikasi data antar lingkungan kerja yang saling terhubung.

Angka presentasi ketersediaan jaringan internet diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung dengan jaringan dari Dinkominfo dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%. Adapun capaian hingga tahun 2020 disajikan pada Tabel 1.23.

Tabel 1.23
Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kab. Temanggung Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel. Yang terhubung	Masih menjadi urusan PDE	88	146	235	317	324
2	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.	Masih menjadi urusan PDE	395	395	395	395	395
3	Ketersediaan jaringan intranet	Masih menjadi urusan PDE	22,28%	36,96%	59,49%	80,25%	82,03%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Dari Tabel 1.23 dapat dilihat bahwa ketersediaan jaringan internet sejak tahun 2016 s.d 2020 cenderung meningkat, karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran. Pada Tabel 1.24 diperlihatkan jumlah ketersediaan jaringan internet secara rinci.

Tabel 1.24
Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Uraian	2020	Kondisi	
			aktif	Tidak aktif
1	Jumlah Kantor/Badan/Dinas	27	27	
2	Jumlah Kecamatan	20	20	
3	Jumlah Kelurahan	23	23	
4	Jumlah Desa	200	194	6
5	Jumlah UPT/eks UPT	54	53	1
JUMLAH		324	317	7

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Catatan : tidak aktif dikarenakan peralatan mati dan belum dilakukan penggantian atau telah beralih menggunakan jaringan internet di luar Dinkominfo

Tabel 1.25
Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung Pemerintah Desa, Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tahun Pemasangan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
1	2	3	4	5	6
1	Bansari	Balesari	2015	√	
2		Gentingsari	2015	√	
3		Gunungsari	2019	√	
4		Mranggen Kidul	2015	√	
5		Mranggen Tengah	2019	√	
6		Purborejo	2015	√	
7		Tlogowero	2019	√	
8	Bejen	Banjarsari	2019	√	
9		Bejen	2018	√	
10		Congkrang	2018	√	
11		Duren	2019	√	
12		Kebondalem	2019	√	
13		Kemuning	2018	√	
14		Lowungu	2018	√	
15		Petung	2018		√

No	Kecamatan	Desa/ Keluarahan	Tahun Pemasangan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
1	2	3	4	5	6
16		Selosabrang	2018	√	
17		Tanjung Sari	2018	√	
18	Bulu	Bansari	2017	√	
19		Bulu	2016	√	
20		Campursari	2017	√	
21		Danupayan	2017	√	
22		Gandurejo	2017	√	
23		Gondosuli	2017	√	
24		Malangsari	2017	√	
25		Mondoretno	2017	√	
26		Ngimbrang	2017	√	
27		Pagergunung	2016	√	
28		Pakurejo	2017	√	
29		Pandemulyo	2017	√	
30		Pasuruhan	2017	√	
31		Pengilon	2016	√	
32		Putat	2017	√	
33		Tegallurung	2017	√	
34		Tegalrejo	2017	√	
35		Wonosari	2017	√	
36		Wonotirto	2016	√	
37	Candiroto	Bantir	2019	√	
38		Batursari	2019	√	
39		Canggal	2019	√	
40		Gunungpayung	2019	√	
41		Kentengsari	2019	√	
42		Krawitan	2018	√	
43		Lempuyang	2019	√	
44		Mento	2018	√	
45		Muneng	2019	√	
46		Muntung	2019	√	
47	Gemawang	Ngabean	2019	√	
48		Banaran	2017	√	
49		Jambon	2017	√	
50		Kalibanger	2017	√	
51		Karangseneng	2017	√	
52		Kemiriombo	2017	√	
53		Krempong	2016	√	
54		Muncar	2019	√	
55		Ngadisepi	2017	√	
56		Sucen	2017	√	
57	Jumo	Barang	2018	√	
58		Gedongsari	2018	√	
59		Giyono	2018	√	
60		Gunung Gempol	2018	√	

No	Kecamatan	Desa/ Keluarahan	Tahun Pemasangan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
1	2	3	4	5	6
61		Jamusan	2018	√	
62		Jombor	2018	√	
63		Jumo	2018	√	
64		Karangtejo	2018	√	
65		Kertosari	2018	√	
66		Ketitang	2018	√	
67		Morobongo	2018	√	
68		Padureso	2018	√	
69		Sukomarto	2018	√	
70	Kaloran	Gandon	2018		√
71		Gandulan	2018		√
72		Geblog	2018	√	
73		Kalimanggis	2016	√	
74		Keblukan	2019	√	
75		Kemiri	2018	√	
76		Tegowanuh	2018	√	
77		Tempuran	2019	√	
78		Tleter	2019	√	
79		Tlogowungu	2018	√	
80	Kandangan	Baledu	2016	√	
81		Banjarsari	2018	√	
82		Blimbing	2019	√	
83		Gesing	2016	√	
84		Kedawung	2017	√	
85		Kedungumpul	2018	√	
86		Kembang Sari	2018	√	
87		Malebo	2015	√	
88		Margolelo	2019	√	
89		Ngemplak	2018	√	
90		Rowo	2017	√	
91		Samiranan	2019	√	
92		Tlogopucang	2015	√	
93		Wadas	2020	√	
94	Kedu	Bandunggede	2019	√	
95		Bojonegoro	2018	√	
96		Candimulya	2018	√	
97		Danurejo	2018	√	
98		Gondangwayang	2017	√	
99		Karangtejo	2018	√	
100		Kedu	2019	√	
101		Kundisari	2016	√	
102		Kutoanyar	2019	√	
103		Mergowati	2020	√	
104		Mojotengah	2018	√	
105		Ngadimulyo	2019	√	

No	Kecamatan	Desa/ Keluarahan	Tahun Pemasangan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
1	2	3	4	5	6
106		Salamsari	2018	√	
107		Tegalsari	2015	√	
108	Kledung	Batursari	2019	√	
109		Canggal	2018	√	
110		Jambu	2019	√	
111		Kalirejo	2019	√	
112		Kledung	2019	√	
113		Kruwisan	2019	√	
114		Kwadungan Gunung	2018	√	
115		Kwadungan Jurang	2019		√
116		Paponan	2019	√	
117		Petarangan	2018	√	
118	Kranggan	Badran	2019	√	
119		Bengkal	2017	√	
120		Gentan	2018	√	
121		Kemloko	2019	√	
122		Klepu	2017	√	
123		Kramat	2018	√	
124		Kranggan	2018	√	
125		Ngropoh	2017	√	
126		Nguwet	2019	√	
127		Pare	2019	√	
128		Pendowo	2017	√	
129		Purwosari	2017	√	
130		Sanggrahan	2017	√	
131	Ngadirejo	Banjarsari	2020	√	
132		Campursari	2019	√	
133		Dlimoyo	2019	√	
134		Gejagan	2018	√	
135		Giripurno	2017	√	
136		Gondangwinangun	2018	√	
137		Kataan	2019	√	
138		Katekan	2018	√	
139		Manggong	2018	√	
140		Mangunsari	2019	√	
141		Medari	2019	√	
142		Munggangsari	2017	√	
143		Petirejo	2019	√	
144		Pringapus	2019		√
145		Purbosari	2019	√	
146		Tegalrejo	2018	√	
147	Parakan	Bagusan	2017	√	
148		Nglondong	2019	√	

No	Kecamatan	Desa/ Keluarahan	Tahun Pemasangan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
1	2	3	4	5	6
149		Parakan Kauman	2018	√	
150		Parakan Wetan	2018	√	
151		Traji	2019	√	
152		Watukumpul	2019	√	
153	Pringsurat	Karangwuni	2018	√	
154		Kebumen	2018	√	
155		Kupen	2018	√	
156		Ngipik	2019	√	
157		Nglorog	2019	√	
158		Pringsurat	2020	√	
159		Rejosari	2019	√	
160		Soborejo	2019	√	
161		Soropadan	2019	√	
162	Selopampang	Bagusan	2019	√	
163		Bulan	2015	√	
164		Bumiayu	2018	√	
165		Gambasan	2015	√	
166		Jetis	2018	√	
167		Kebonagung	2019	√	
168		Kecepit	2015	√	
169		Plumbon	2015	√	
170		Selopampang	2019		√
171		Tanggulanom	2017	√	
172	Temanggung	Banyuurip	2018	√	
173		Temanggung I	2017	√	
174		Temanggung II	2018	√	
175		Butuh	2018	√	
176		Jampirejo	2018	√	
177		Jampiroso	2017	√	
178		Kertosari	2018	√	
179		Kowangan	2018	√	
180		Sidorejo	2018	√	
181		Jurang	2015	√	
182		Kebonsari	2018	√	
183		Manding	2018	√	
184		Mungseng	2018	√	
185		Giyanti	2018	√	
186		Purworejo	2018	√	
187		Gilingsari	2016	√	
188		Guntur	2016	√	
189		Joho	2015	√	
190		Lungge	2019	√	
191		Madureso	2018	√	
192		Nampirejo	2016	√	
193		Tlogorejo	2018	√	

No	Kecamatan	Desa/ Keluarahan	Tahun Pemasangan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
1	2	3	4	5	6
194		Walitelon Selatan	2018	√	
195		Walitelon Utara	2018	√	
196	Tembarak	Drono	2018	√	
197		Greges	2019	√	
198		Jragan	2019	√	
199		Kemloko	2017	√	
200		Krajan	2019	√	
201		Menggoro	2019	√	
202		Purwodadi	2019	√	
203		Tembarak	2019	√	
204	Tlogomulyo	Candisari	2018	√	
205		Kerokan	2017	√	
206		Langgeng	2019	√	
207		Legoksari	2017	√	
208		Losari	2020	√	
209		Tanjungsari	2018	√	
210		Tlogomulyo	2019	√	
211	Tretep	Tretep	2019	√	
212	Wonoboyo	Cemoro	2016	√	
213		Kebonsari	2016	√	
214		Pateken	2016	√	
215		Pitrosari	2019	√	
216		Purwosari	2019	√	
217		Rejosari	2016	√	
218		Semen	2016	√	
219		Tawang Sari	2016	√	
220		Tening	2017	√	
221		Wates	2019	√	
222		Wonoboyo	2016	√	
223		Wonocoyo	2016	√	
JUMLAH				222	6

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Tabel 1.26
Detail Ketersediaan Jaringan Internet di Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2020

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Dinas Perhubungan	√	
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	√	

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	√	
4	Dinas Kesehatan	√	
5	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	√	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	
8	DPRD Temanggung	√	
9	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	√	
10	Dinas Sosial	√	
11	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	√	
12	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	√	
13	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	√	
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	√	
15	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD Djoyonegoro)	√	
16	Dinas Tenaga Kerja	√	
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	√	
18	Dinas Lingkungan Hidup	√	
19	Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran	√	
20	Sekretariat Daerah	√	
21	Inspektorat	√	
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√	
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	√	
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	√	
25	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	√	
26	Dinas Perikanan Dan Peternakan	√	
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	
Jumlah		27	-

Tabel 1.27
Detail Ketersediaan Jaringan Internet di Pemerintah Kecamatan
Tahun 2020

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Kecamatan Temanggung	√	
2	Kecamatan Pringsurat	√	
3	Kecamatan Kranggan	√	
4	Kecamatan Selopampang	√	
5	Kecamatan Tembarak	√	
6	Kecamatan Tlogomulyo	√	
7	Kecamatan Bulu	√	
8	Kecamatan Kedu	√	
9	Kecamatan Kaloran	√	
10	Kecamatan Kandangan	√	
11	Kecamatan Jumo	√	
12	Kecamatan Gemawang	√	
13	Kecamatan Bansari	√	
14	Kecamatan Kledung	√	
15	Kecamatan Ngadirejo	√	
16	Kecamatan Candiroto	√	
17	Kecamatan Wonobojo	√	
18	Kecamatan Tretep	√	
19	Kecamatan Bejen	√	
20	Kecamatan Parakan	√	
Jumlah		20	-

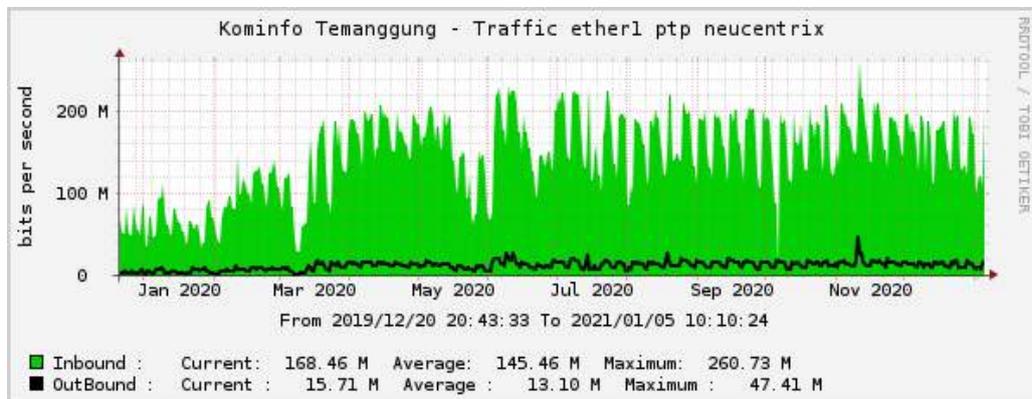
Tabel 1.28
Detail Ketersediaan Jaringan Internet di Unit Pelayanan Teknis
Tahun 2020

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Pusat Komunitas Kreatif dan UMKM Center	√	
2	Puskesmas Temanggung	√	
3	Puskesmas Marsudirini	√	
4	Laboratorium Tembakau	√	
5	Laboratorium BKPSDM	√	
6	Puskesmas Rejosari	√	
7	Puskesmas Kedu	√	
8	Puskesmas Banjarsari	√	
9	Puskesmas Gemawang	√	
10	Puskesmas Tretep	√	
11	Puskesmas Parakan	√	

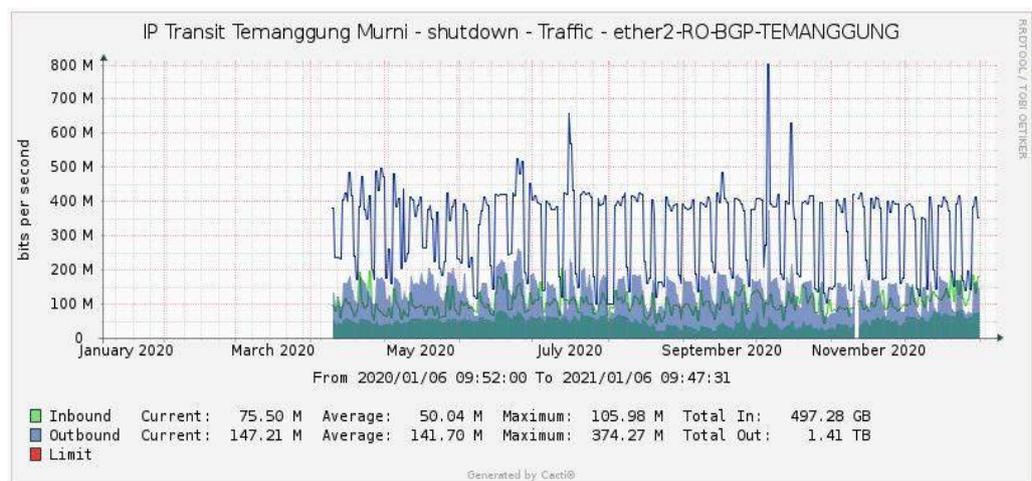
No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
12	Puskesmas Bulu	√	
13	Puskesmas Kledung	√	
14	Puskesmas Ngadirejo	√	
15	Puskesmas Kandangan	√	
16	UPT Pasar Temanggung	√	
17	UPT Pasar Kranggan	√	
18	UPT Pasar Parakan	√	
19	UPT Pasar Ngadirejo		√
20	UPT Pasar Candiroto	√	
21	UPT Dindik Tembarak	√	
22	UPT Dindik Wonobooyo	√	
23	UPT KBPP Walitelon	√	
24	UPT KBPP Kranggan	√	
25	UPT KBPP Candiroto	√	
26	Badan Penyuluh Pertanian Walitelon	√	
27	Badan Penyuluh Pertanian Selopampang	√	
28	Badan Penyuluh Pertanian Pringsurat	√	
29	Badan Penyuluh Pertanian Kaloran	√	
30	Badan Penyuluh Pertanian Kandangan	√	
31	Badan Penyuluh Pertanian Gemawang	√	
32	Badan Penyuluh Pertanian Kledung	√	
33	Badan Penyuluh Pertanian Ngadirejo	√	
34	Badan Penyuluh Pertanian Wonobooyo	√	
35	Badan Penyuluh Pertanian Bejen	√	
36	Badan Penyuluh Pertanian Candiroto	√	
37	Badan Penyuluh Pertanian Tretep	√	
38	Badan Penyuluh Pertanian Kedu	√	
39	Badan Penyuluh Pertanian Bulu	√	
40	UPT BLK Maron	√	
41	UPT Dindik Gemawang	√	
42	UPT DPUPKP	√	
43	TPA Sanggrahan	√	
44	UPT Dinas Peternakan dan Perikanan Balai Benih Ikan	√	
45	RPH	√	
46	Puskesmas Bansari	√	
47	Puskesmas Candiroto	√	
48	Badan Penyuluh Pertanian Temanggung	√	
49	UPT KBPP Gemawang	√	
50	Temanggung TV	√	
51	eRTe FM	√	
52	PMI Temanggung	√	

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
53	BAZ	√	
54	Rest Area Pingit	√	
Jumlah		53	1

Jaringan internet dilewatkan melalui media kabel (wired) dan nirkabel (wireless) dengan topologi tertentu. System ini merupakan jalan utama interkoneksi untuk pemanfaatan layanan SPBE. Data occulancy trafik pada jaringan kominfo terlihat pada Gambar 1.10 dan Gambar 1.11



Gambar 1.10.
Grafik Okupansi Bandwidth Internet OPD, UPT/eksUPT dan Desa ISP PIKANET



Gambar 1.11.
Grafik Okupansi Bandwidth Internet OPD, UPT/eksUPT dan Desa ISP LDP

6) Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. (2007:42) Sistem Informasi Manajemen. Palgrave, Basingstoke)

Sistem informasi yang terintegrasi merupakan sistem informasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga data dari suatu sistem dapat melintas, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Angka persentase sistem informasi yang terintegrasi diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikalikan 100 %.

Realisasi persentase sistem informasi yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.29.

Tabel 1.29
Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten
Temanggung, Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	Belum menjadi urusan kominfo	5	19	31	61	82
2	Jumlah sitem informasi	sda	377	398	456	461	507
3	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	sda	1,3 %	4,7%	6,79%	13,23 %	16,17 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Berdasarkan Tabel 1.29 dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan, karena adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem

informasi sebagai acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Data sistem informasi yang terintegrasi sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.30.

Tabel 1.30
Sistem Informasi yang terintegrasi

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TERINTE-GRASI TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
1	Simbada	2017	1	e-movev
2	sibangda	2017	1	mapatda
3	Lpse	2016	1	sirup
4	Jdih	2018	1	e-dokum (dokumen hukum)
5	PPID	2020	1	Temanggung Gandem
6	Portal VPN dan SSO	2018	1	sistem informasi lain
7	dindikpora	2018	1	sistem informasi kemendikbud
8	Sipd	2017	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
9	dindukcapil	2017	1	layanan kependudukan online
10	perizinan-dpmpstsp	2018	1	data kependudukan
11	monitorabsen	2017	1	Simpeg, e-tpg, e-kinerja
12	Gabungan Data (Gandem)	2016	1	bank data, sipd, data
13	e-kinerja	2017	1	simpeg, e-tpg, monitor absen
14	simpeg	2017	1	e-kinerja, e-tpg, monitor absen, p2kp
15	Bankdata	2016	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
16	Gis Tata Ruang	2018	1	GIS Terintegrasi
17	e-TPP	2017	1	simpeg, e-kinerja, monitor absen
18	Portal Web BKPSDM	2018	1	simpeg, e-kinerja, e-tpg, monitor absen, p2kp
19	e-retribusi	2018	1	bank BPD Jateng
20	inbox.bkd	2017	1	simpeg
21	e-peluk ASN	2017	1	simpeg
22	mapatda	2017	1	sibangda, sig-mapatda
23	sig-mapatda-bppkad	2017	1	mapatda
24	Data	2016	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
25	layanan kependudukan online	2017	1	data kependudukan
26	e-planning	2018	1	e-budgeting, e-monev
27	e-budgeting	2018	1	e-planning, e-monev
28	sirup	2016	1	lpse

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TERINTE-GRASI TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
29	e-monev	2018	1	e-budgeting, e-planning
30	e-dokum (katalog dokumen hukum)	2018	1	jdih
31	GIS Terintegrasi	2018	1	gis tataruang
32	SMS	2019	1	Lapor SP4N
33	Simpus (24 aplikasi)	2019	26	Data kependudukan
34	e-risalah	2019	1	Jdih
35	Aplikasi Anjab-ABK	2020	1	E-Kinerja
36	e-statistik	2019	1	PPID
37	Data Kemiskinan Daerah (Santunan Kematian)	2020	1	Temanggung Gandem
38	Temanggung Gandem	2020	1	e-statistik, santunan kematian
39	Web Corona	2020	1	web PT. DSN
40	E-Office	2020	1	simpeg, jdih
41	E-Keuangan	2020	1	e-budgeting
42	SDS	2020	1	SDS Provinsi Jateng
43	Dashboard SIMPUS	2020	1	simpus masing-masing Puskesmas
44	Retribusi DPUPKP	2020	1	Gis Terintegrasi
45	Layanan 24/7	2020	1	Smart Office DPUPKP
46	SIMBOS	2020	1	SIMBOS Pusat
47	PPDB Online	2020	1	PPDB Pusat
48	Aplikasi Pendataan Pemudik	2020	1	data kependudukan
49	SIAK	2020	1	data kependudukan
50	Aplikasi Android Temanggung Gandem	2020	1	Gandem, E-Statistik, PPID, JDIH
51	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gandem Pol	2020	1	data kependudukan
52	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	2020	1	MAPATDA
53	Aplikasi Dashboard Geospasial	2020	1	GIS Tata Ruang
54	Aplikasi SANKA Android	2020	1	Data Kependudukan
55	Aplikasi SANKA Web	2020	1	Data Kependudukan
56	SIM DKD	2020	1	Data Kependudukan
57	SIMRS	2020	1	BPJS
Jumlah			82	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Tabel 1.31
Detail Sistem Informasi Kabupaten Temanggung

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	temanggungkab.go.id	1	Sebuah Portal website Kabupaten Temanggung
2	Simbada	1	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) untuk mengelola Aset di masing-masing instansi
3	sibangda	1	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah
4	lpse	1	Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
5	jdih	1	Aplikasi yang menampilkan dokumentasi dan informasi hukum
6	mail	1	Aplikasi Email Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung
7	sms	1	Aplikasi pengaduan melalui SMS Gateway
8	dindikpora	1	Website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
9	sipd	1	Sistem Informasi / Aplikasi Yang Mendokumentasikan, Mengadministrasikan, Serta Mengolah Data Pembangunan Daerah Menjadi Informasi Yang Disajikan Kepada Masyarakat Dan Sebagai Bahan Dalam Pengambilan Keputusan
10	puskomkref	1	Website puskomkref
11	simwasda.inspektorat	1	Sistem Informasi Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (SIMWASDA)
12	ppid	1	Aplikasi PPID Utama Pemkab Temanggung
13	dindukcapil	1	Website Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil
14	cellplan	1	Sistem Informasi Pengecekan Koordinat cellplan Menara Telekomunikasi Kabupaten Temanggung
15	perizinan-dpmpptsp	1	Layanan Perizinan online
16	monitorabsen (E-Absensi)	1	Sistem Informasi untuk melakukan monitoring absensi pegawai
17	sipt	1	Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Dinas Kesehatan
18	gandem	1	Sistem Informasi Pusat Data Terpadu (Gabungan Data Temanggung)
19	simdkt	1	Sistem Informasi Data Kemiskinan Terpadu (SIMDKT)
20	e-kinerja	1	aplikasi manajemen kinerja pegawai
21	simpeg	1	Aplikasi manajemen kepegawaian
22	Bankdata	1	Sistem Informasi / Aplikasi Dari Pemerintah (daerah) Terkait Dengan Kumpulan Data Data / Aset Penting Di Pemerintah Kabupaten Temanggung
23	Tata Ruang	1	sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JUMLAH	KETERANGAN
			Temanggung yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang di Kabupaten Temanggung
24	e-TPP	1	istem Informasi / Aplikasi Untuk Mendata Tunjangan Pokok Pegawai Di Kabupaten Temanggung
25	Portal Sistem Informasi	1	Portal kumpulan semua Sistem Informasi / Aplikasi yang terdata di Kabupaten Temanggung
26	bkpsdm	1	Portal Sistem Informasi BKPSDM
27	e-retribusi Pasar	1	Layanan Penarikan Retribusi Pasar secara Online
28	inbox.bkd	1	aplikasi pencatatan surat masuk
29	e-peluk ASN	1	aplikasi pelayanan keluhan ASN
30	mapatda	1	Sistem Informasi / Aplikasi Tentang Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Kinerja Integrasi Data
31	sig-mapatda-bppkad	1	Aplikasi Manajemen Pendapatan Daerah berbasis Peta
32	data	1	portal untuk menjembatani pengambilan data dari Bank Data Pembangunan ke Aplikasi Gandem
33	layanan kependudukan online	1	Aplikasi Pelayanan Kependudukan secara Online
34	e-planning	1	sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
35	e-budgeting	1	sistem informasi penyusunan anggaran kegiatan
36	sirup	1	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
37	e-risalah	1	Aplikasi Tentang Pengelolaan Risalah DPRD Kabupaten Temanggung
38	e-monev	1	Aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan
39	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1	aplikasi yang menampilkan katalog dokumen hukum/ peraturan
40	rupabumi	1	Aplikasi untuk mempermudah pendataan Cagar Budaya di Kabupaten Temanggung
41	GIS Terintegrasi	1	Sistem Informasi / Aplikasi Untuk Mendata Citra Satelit Atau Peta Yang Sudah Terintegrasi Oleh Sistem
42	Portal VPN dan SSO	1	Portal Aplikasi terintegrasi yang menerapkan teknologi VPN
43	mediacenter	1	Website Resmi Media Center Kabupaten Temanggung
44	website kecamatan	20	Website resmi Kecamatan
45	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	266	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan
46	Website OPD	23	Website resmi OPD
47	paten-kecamatan	20	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
48	simpus	26	Sistem Informasi Puskesmas

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JUMLAH	KETERANGAN
49	web puskesmas	26	Website Resmi Pusat Kesehatan Masyarakat
50	e-Statistik	1	Sistem Informasi / Aplikasi Penyaji Data Statistik Kab. Temanggung Untuk Membantu Memudahkan Pengguna Mengakses Data Secara Cepat Dan Mudah
51	e-Usaha	1	Aplikasi untuk pendataan usaha (DPMPTSP)
52	Data Kemiskinan Daerah (Santunan Kematian)	1	Sistem Informasi Santunan Kematian Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
53	Apdul (Schedule)	1	Aplikasi untuk melakukan pengaturan <i>schedule</i> kegiatan
54	Temanggung Gadem	1	System Informasi yang menampilkan data dan informasi serta pelayanan publik di Temanggung
55	Rekap Pilkades	1	aplikasi untuk rekap cepat Pemilihan Kepala Desa di Kab. Temanggung
56	Web Corona	1	Website pemantauan Corona di Kabupaten Temanggung
57	Hebat	1	Website himpunan berita Temanggung (Humas)
58	E-Office	1	Aplikasi Surat Elektronik dan Pengelolaan Kearsipan
59	PPID Pembantu	46	Website resmi PPID Pembantu di Kabupaten Temanggung
60	E-Keuangan	1	Layanan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
61	SIRENJA	1	Sistem Informasi Rencana Kerja
62	Evarenbang	1	SISTEM INFORMASI EVALUASI MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
63	Saran Aduan SIMDKT	1	Sistem Informasi / Aplikasi Dari Pemerintah (daerah) Terkait Dengan Pelaporan Saran Dan Aduan Informasi Data Kemiskinan Yang Ada Di Kabupaten Temanggung
64	Bibliotecha Dinarpus	1	Portal Sistem Informasi katalog buku Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
65	Wisata Temanggung	1	Website Wisata Temanggung
66	SDS	1	Aplikasi Single Data System
67	Dashboard Dinkes	1	Halaman Dashboard Dinas Kesehatan
68	Dashboard SIMPUS	1	Sistem Informasi Pusat Kesehatan Masyarakat
69	NMS	1	Aplikasi untuk memonitoring jaringan
70	Retribusi DPUPKP	1	Sistem Informasi tentang pelayanan retribusi DPUPKP
71	Layanan 24/7	1	Sistem Informasi Layanan 24/7 DPUPKP
72	SIMBOS	1	Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah
73	PPDB Online	1	Portal Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Temanggung
74	Website DINSOS	1	Website Resmi Dan Portal Layanan Informasi Publik (PPID) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JUMLAH	KETERANGAN
75	Website Temanggung TV	1	Website resmi Temanggung TV
76	Aplikasi Pendataan Pemudik	1	Aplikasi untuk pendataan pemudik Temanggung
77	SIK	1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
78	Aplikasi Android Temanggung Gandem	1	Aplikasi android yang menampilkan data dan informasi serta pelayanan publik di Temanggung
79	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gandem Pol	1	Aplikasi android untuk pelayanan kependudukan
80	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	1	Sistem Informasi untuk mengelola Objek Pajak
81	Aplikasi ANJAB dan ABK	1	Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
82	Aplikasi Dashboard Geospasial	1	Aplikasi dashboard yang menampilkan informasi berbasis geospasial
83	Aplikasi SANKA Web	1	Aplikasi Santunan Kematian berbasis Website
84	Aplikasi SANKA Android	1	Aplikasi Santunan Kematian berbasis Android
85	SIM DKD	1	Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah
86	SIMRS	1	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
87	Siskeudes	1	Sistem Informasi Keuangan Desa
	JUMLAH	507	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Di Kabupaten Temanggung terdapat 507 Sistem Informasi yang aktif dibawah pemantauan Dinkominfo. Beberapa sistem informasi yang belum terintegrasi dikarenakan sistem informasi yang telah dibangun sebelumnya menggunakan teknologi yang berbeda-beda sehingga mempersulit pengintegrasian antar sistem informasi.

7) Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

Sistem informasi yang berfungsi optimal adalah sistem informasi yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, baik secara sistem, pengelolaan, maupun penggunaannya.

Angka persentase sistem informasi yang berfungsi optimal diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikali 100%.

Realisasi persentase sistem informasi yang berfungsi optimal di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.32.

Tabel 1.32
Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal	Belum dilakukan pengendalian	20	29	175	185	265
2	Jumlah sistem informasi	sda	377	398	456	461	507
3	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	sda	5,3 %	7,2 %	38,38 %	40,13 %	52,27 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Berdasarkan Tabel 1.32 dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2015-2020 mengalami peningkatan, karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Adapun daftar sistem informasi yang berfungsi optimal sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.33.

Tabel 1.33
Daftar Sistem Informasi yang berfungsi optimal tahun 2016-2020

NO	NAMA SIM	BERFUNGSI OPTIMAL				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	temanggungkab.go.id	1	1	1	1	1
2	Simbada	1	1	1	1	1
3	sibangda	1	1	1	1	1
4	lpse	1	1	1	1	1
5	jdih			1	1	1
6	p2kp	1	1	1	1	1
7	mail			1	1	1
8	sms	1	1	1	1	1

NO	NAMA SIM	BERFUNGSI OPTIMAL				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	dindikpora			1	1	1
10	sipd	1	1	1	1	1
11	puskomkref			1	1	1
12	simwasda.inspektorat			1	1	1
13	ppid			1	1	1
14	dindukcapil			1	1	1
15	cellplan			1	1	1
16	perizinan-dpmpstsp			1	1	1
17	rsud			1		
18	monitorabsen		1	1	1	1
19	sipt			1	1	1
20	gandem			1	1	1
21	simdkt			1	1	1
22	e-kinerja		1	1	1	1
23	simpeg	1	1	1	1	1
24	Bankdata			1	1	1
25	Gis Tata Ruang		1	1	1	1
26	e-TPP		1	1	1	1
27	Portal Sistem Informasi			1	1	1
28	bkpsdm			1	1	1
29	sivespa			1	1	1
30	e-retribusi			1	1	1
31	simelon			1	1	1
32	inbox.bkd			1	1	1
33	e-peluk ASN			1	1	1
34	mapatda	1	1	1	1	1
35	sig-mapatda-bppkad			1	1	1
36	data			1	1	1
37	layanan kependudukan online			1	1	1
38	e-planning			1	1	1
39	e-budgeting			1	1	1
40	sirup	1	1	1	1	1
41	e-risalah			1	1	1
42	e-monev			1	1	1
43	sigender			1	1	1
44	e-dokum (katalog dokumen hukum)			1	1	1
45	rupabumi			1	1	1
46	GIS Terintegrasi			1	1	1
47	Portal VPN dan SSO			1	1	1
48	mediacenter			1	1	1
49	musrenbang			1		
50	website kecamatan			18	20	20

NO	NAMA SIM	BERFUNGSI OPTIMAL				
		2016	2017	2018	2019	2020
51	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	10	14	20	20	25
52	Website OPD			18	22	22
53	paten-kecamatan			20	20	20
54	simpus			24	24	24
55	web puskesmas			26	26	26
56	simpeda		1			
57	surya					
58	kantaya					
59	simonit					
60	tito.bappeda					
61	dekranasda					
62	e-Statistik				1	1
63	e-Usaha				1	1
64	Santunan Kematian				1	1
65	Apdul (Schedule)				1	1
66	Temanggung Gandem				1	1
67	rekap pilkades					1
68	Web corona					1
69	Hebat					1
70	E-Office					1
71	PPID Pembantu					46
72	E-Kuangan					1
73	SIRENJA					1
74	Evarenbang					1
75	Saran Aduan SIMDKT					
76	Bibliotecha Dinarpus					1
77	Wisata Temanggung					1
78	SDS					1
79	Dashboard Dinkes					1
80	Dashboard SIMPUS					1
81	NMS					1
82	Retribusi DPUPKP					1
83	Layanan 24/7					1
84	SIMBOS					1
85	PPDB Online					1
86	Website DINSOS					1
87	Website Temanggung TV					1
88	Aplikasi Pendataan Pemudik					1
89	SIAK					1
90	Aplikasi Android Temanggung Gandem					1

NO	NAMA SIM	BERFUNGSI OPTIMAL				
		2016	2017	2018	2019	2020
91	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gandem Pol					1
92	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)					1
93	Aplikasi ANJAB dan ABK					1
94	Aplikasi Dashboard Geospasial					1
95	Aplikasi SANKA Web					1
96	Aplikasi SANKA Android					1
97	SIM DKD					1
98	SIMSRS					1
99	Siskeudes					1
	Jumlah	20	29	175	185	265

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

8) Cakupan ketersediaan data makro daerah

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah, karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Produk data statistik dasar meliputi Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan lain sebagainya. Sedangkan produk data statistik sektoral meliputi Statistik Kabupaten Temanggung, Bank Data Pembangunan dan lain sebagainya.

Jenis data makro daerah yang ditentukan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung sejumlah 5 (lima) yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 1.34
Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Data makro yang tersedia	7	5	6	6	5	5
2	Kebutuhan data makro	7	7	7	7	5	5
3	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	100%	71,4%	85,7%	87%	100%	100%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Tabel 1.35
Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020

No	Jenis Data	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Laju Inflasi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	tersedia	tidak tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	-	-
7	Indeks Gini	tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia	-	-
	TOTAL	7	5	6	6	5	5

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

9) Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui

tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentikasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital. Saat ini penyelenggaraan persandian adalah untuk keamanan informasi dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang telah dilatih yaitu sandiman.

Dalam pembangunan suatu aplikasi berbasis web, perlu dilakukan pengujian berdasarkan tingkat kualitas dan keamanannya. Kualitas sebuah aplikasi ditentukan oleh dua faktor yaitu bugs (aplikasi tidak bias memenuhi sebagian spesifikasi kebutuhan yang sudah disepakati) dan security vulnerability (Aplikasi memiliki fungsi yang tidak diinginkan).

Aplikasi berbasis web memiliki banyak potensi risiko keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Potensi keamanan dari aplikasi dapat diketahui dengan melaksanakan IT Security Assessment, yaitu pengujian terhadap sistem keamanan yang telah diterapkan pada suatu sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya celah keamanan dalam aplikasi tersebut.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah sehingga dapat terwujud layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna.

Tingkat Kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai prosedur dan standar untuk menghitung indikator outputnya dengan rumus yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dibagi jumlah sistem elektronik yang ada dikali seratus persen.

Tabel 1.36
Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	n.a	n.a	n.a	5	5	2
2	Jumlah sistem elektronik	n.a	n.a	n.a	60	461	463
3	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	n.a	n.a	n.a	8,3%	1,08	0,43

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Berdasarkan Tabel 1.36 diatas dapat dilihat tingkat kesiapan penilaian/ pengelolaan resiko keamanan informasi pada tahun 2018 masih sangat kecil, karena kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu dengan Security Assessment. Pada tahun 2019 dapat dikerjasamakan sejumlah 5 (lima) sistem informasi, namun mulai tahun 2020 dibatasi hanya 3 (tiga) sistem informasi akan tetapi tidak bisa dikerjasamakan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dikarenakan beberapa faktor. Sedangkan target yang ditetapkan tahun 2019-2023 sebesar 1% per tahun, beberapa faktor yang menghambat terlaksananya Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung di tahun 2020 sehingga hanya berada di 0,43 % adalah adanya pandemi penyakit koronavirus 2019 (*Covid-19*) yang pada sekitaran bulan maret – april 2020 sudah menyebar ke seluruh wilayah provinsi sehingga banyak dilakukan lock down dan karantina wilayah yang menyebabkan terbatasinya keluar masuk manusia dari satu wilayah ke wilayah lainya, dikarenakan keterbatasan SDM di wilayah kabupaten temanggung untuk melakukan Penilaian Persiapan/ Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung

secara mandiri sehingga perlu adanya kerjasama dengan pihak luar dalam hal ini badan siber dan sandi negara (BSSN) tidak bisa dilaksanakan sehingga alternatif kerjasama dengan pihak diluar pemerintahan pun dilakukan dengan menggandeng PITSI (PT Pilar Teknotama Sinergi) untuk melakukan vulnerability Assesment pada aplikasi situs resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung . Faktor lain yang menghambat kegiatan ini untuk bisa dilaksanakan adalah terkait pemotongan anggaran yang digunakan untuk menangani dampak dari Pandemi penyakit korona virus Ini sehingga pagu anggaran yang di rencanakan untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan untuk menangani dampak virus Covid-19.

Data dukung terkait tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi disajikan pada Tabel 1.37 dan Tabel 1.38.

Tabel 1.37
Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
1	bag humas	Website Pemkab	1	temanggungkab.go.id.temanggungekab.go.id
2	bppkad	Simbada	1	Simbada.temanggungkab.go.id
3	bag pembangunan	Sibangda	1	sibangda.temanggungkab.go.id
4	bag pembangunan	LPSE	1	lpse.temanggungkab.go.id
5	bag Hukum	JDIH	1	jdih.temanggungkab.go.id
6	BKPSDM	P2KP	1	p2kp.temanggungkab.go.id
7	Dinkominfo	Mail	1	mail.temanggungkab.go.id
8	Dinkes	Simpus	1	simpus.temanggungkab.go.id
9	bag humas	Sms	1	sms.temanggungkab.go.id
10	dindikpora	Dindikpora	1	dindikpora.temanggungkab.go.id
11	off	Simonit	1	simonit.temanggungkab.go.id
12	bappeda	Sipd	1	sipd.temanggungkab.go.id
13	bappeda	tito.bappeda	1	tito.bappeda.temanggungkab.go.id
14	off	Dekranasda	1	dekranasda.temanggungkab.go.id
15	Dinkominfo	Puskomkref	1	puskomkref.temanggungkab.go.id
16	inspektorat	simwasda.inspektorat	1	simwasda.inspektorat.temanggungekab.go.id

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
17	Dinkominfo	Ppid	1	ppid.temanggungkab.go.id
18	Dindukcapil	Dindukcapil	1	dindukcapil.temanggungkab.go.id
19	DPMPTSP	Cellplan	1	cellplan.temanggungkab.go.id
20	DPMPTSP	perizinan-dpmptsp	1	perizinan-dpmptsp.temanggungkab.go.id
21	BKPSDM	monitorabsen	1	monitorabsen.temanggungkab.go.id
22	Dinkes	Sipt	1	sipt.temanggungkab.go.id
23	Dinkominfo	website kecamatan	1	website kecamatan.temanggungkab.go.id
24	dinsos	web dinsos	1	web dinsos.temanggungkab.go.id
25	Dinkominfo	Gandem	1	gandem.temanggungkab.go.id
26	bappeda	Simdkt	1	simdkt.temanggungkab.go.id
27	dinpermades	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	1	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan).temanggungkab.go.id
28	bag ortala	e-kinerja	1	e-kinerja.temanggungkab.go.id
29	BKPSDM	Simpeg	1	simpeg.temanggungkab.go.id
30	Dinkominfo	Bankdata	1	Bankdata.temanggungkab.go.id
31	DPUPKP	Gis Tata Ruang	1	Gis Tata Ruang.temanggungkab.go.id
32	bag ortala	e-TPP	1	e-TPP.temanggungkab.go.id
33	Dinkominfo	Website OPD	1	Website OPD.temanggungkab.go.id
34	Dinkominfo	Portal Sistem Informasi	1	Portal Sistem Informasisifo.temanggungkab.go.id
35	BKPSDM	Bkpsdm	1	bkpsdm.temanggungkab.go.id
36	satpolppdamkar	sivespa-satpolppdamkar	1	sivespa-satpolppdamkar.temanggungkab.go.id
37	Dinperindagkopukm	e-retribusi	1	e-retribusi.temanggungkab.go.id
38	Bag perekonomian	simelon3kg-setda	1	simelon3kg-setda.temanggungkab.go.id
39	BKPSDM	inbox.bkd	1	inbox.bkd.temanggungkab.go.id
40	BKPSDM	e-peluk ASN	1	e-peluk ASN.temanggungkab.go.id
41	bppkad	Mapatda	1	mapatda.temanggungkab.go.id
42	bppkad	sig-mapatda-bppkad	1	sig-mapatda-bppkad-online.temanggungkab.go.id
43	Dinkominfo	Data	1	data.temanggungkab.go.id

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
44	Dindukcapil	layanan kependudukan online	1	layanan kependudukan onlinedindukcapil.temanggungkab.go.id/pelayanan
45	bappeda	e-planning	1	e-planning.temanggungkab.go.id
46	bppkad	e-budgeting	1	e-budgeting.temanggungkab.go.id
47	bag. Pembangunan (pusat)	Sirup	1	sirup.temanggungkab.go.id
48	BPPKAD	SIAKD (akrual)	1	dekstop base
49	dinpermades	siskeudes	1	dekstop base
50	SETWAN	e-risalah	1	e-risalah.temanggungkab.go.id
51	bappeda	e-monev	1	e-monev.temanggungkab.go.id
52	DPPKBPPPA	sigender	1	sigender.temanggungkab.go.id
53	Bag. Hukum	e-dokum	1	e-dokum.temanggungkab.go.id
54	Bag. Pemerintahan	rupabumi	1	rupabumi.temanggungkab.go.id
55	Dinkes	web puskesmas	1	web puskesmas.temanggungkab.go.id
56	Dinkominfo	GIS Terintegrasi	1	GIS Terintegrasi.temanggungkab.go.id
57	Dinkominfo	Portal VPN dan SSO	1	Portal VPN dan SSO.temanggungkab.go.id
58	Dinkominfo	mediacenter	1	mediacenter.temanggungkab.go.id
59	bappeda	musrenbang	1	musrenbang.temanggungkab.go.id
60	DPMPSTP	paten-kecamatan	1	paten-kecamatan.temanggungkab.go.id
61	Dinkominfo	website kecamatan	20	temanggung.temanggungkab.go.id
62	Dinkominfo	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	289	kedungumpul-kandangan.temanggungkab.go.id (sample)
63	Dinkominfo	Website OPD	22	bkpsdm.temanggungkab.go.id
64	Dinkominfo	paten-kecamatan	20	tidak dipublikasi
65	Dinkominfo	simpus	24	dashboardsimpus.temanggungkab.go.id

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
66	Dinkominfo	web puskesmas	26	puskesmastemanggung.temanggungkab.go.id (sample)
67	Dinkominfo	Rekap pilkades	1	pilkades2020.temanggungkab.go.id
68	Dinkominfo	Web corona	1	corona.temanggungkab.go.id
JUMLAH			463	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Tabel 1.38
Hasil TT Security Assesment oleh BSSN di Kabupaten Temanggung

NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT	TINGKAT RESIKO	TAHUN ASSESMENT
1	Dinkominfo	Gandem	https://gandem.temanggungkab.go.id	Tinggi	2018
2	BPPKAD	Mapatda	http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/	Sedang	2018
3	BKPSDM	Simpeg	http://www.bkpsdm.temanggungkab.go.id	Tinggi	2018
4	Dinas Kesehatan	Simpus	http://ujisimpus.temanggungkab.go.id	Sedang	2018
5	Bappeda	Simdkt	http://simdkt.temanggungkab.go.id	Tinggi	2018
6	Bappeda	e-planning	e-planning.temanggungkab.go.id	Sedang	2019
7	BKPSDM	e-tpp	e-tpp.temanggungkab.go.id	Tinggi	2019
8	BPPKAD	Mapatda	http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/	Sedang	2019
9	Dinhub	Ujikir		Tinggi	2019
10	BKPSDM	e-kinerja	Kinerja.temanggungkab.go.id	Tinggi	2019
11	Dinkominfo	kominfo	Kominfo.temanggungkab.go.id	sedang	2020
12	Dinkominfo	Jurnalbhumi phala	Jurnalbhumi phala.temanggungkab.go.id	sedang	2020

Sumber: Dinkominfo Kab. Temanggung 2020

Dalam menyelenggarakan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan, mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan, dan kesediaan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas, mulai tahun 2019 akan dilaksanakan evaluasi kesiapan keamanan sistem informasi demi mendapatkan gambaran kondisi kesiapan dan kematangan keamanan informasi, yaitu melalui evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI), dengan tujuan mengetahui kekurangan manajemen keamanan sistem informasi di pemerintahan dan merumuskan rekomendasi perbaikannya.

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama,

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama

pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinkominfo Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, dan Gandem			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan 2. Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi 3. Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah 4. Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik 5. Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik 6. Peningkatan ketersediaan data-data statistik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan. 2. Meningkatkan kualitas layanan SPBE. 3. Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Mengintegrasikan data dan sistem layanan informasi berbasis teknologi informasi. 5. Meningkatkan kualitas sistem pengamanan informasi. 6. Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan. 7. Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi. 8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyediakan data makro daerah. 9. Optimalisasi ketersediaan data pembangunan daerah melalui single data.

Sumber : Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai keterbukaan informasi publik

Sumber : Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dinkominfo Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,75	Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai: 1) Domain Kebijakan Internal SPBE; 2) Domain Tata Kelola SPBE; 3) Domain Layanan SPBE.	Dinkominfo
	Nilai keterbukaan informasi publik	78,70	Nilai Keterbukaan Informasi setiap tahunnya didapatkan melalui: 1. Tahap Penilaian Kelengkapan Informasi pada website Badan Publik; 2. Pengisian Self Assesment Quisionare (SAQ) 3. Verifikasi dan Klarifikasi hasil pengisian SAQ 4. Presentasi PPID Badan Publik 5. Uji Publik	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	12%	Jumlah PPID badan publik yang aktif dibagi jumlah badan publik dikali 100%	Dinkominfo
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	15%	Jumlah KIM yang aktif dibagi jumlah KIM yang ada dikali 100%	Dinkominfo
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	Jumlah LPP yang patuh terhadap norma siaran dibagi jumlah LPP dikali 100%	Dinkominfo
	Terwujudnya pengelolaan SPBE	Persentase ketersediaan akses internet publik	90%	Jumlah ketersediaan akses internet di area publik dibagi jumlah area publik dikali 100%	Dinkominfo
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	100%	Jumlah OPD yang menggunakan jaringan intranet dibagi jumlah OPD dikali 100%	Dinkominfo
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	20%	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegritas dibagi jumlah sistem informasi yang ada dikali 100%	Dinkominfo
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	45%	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi jumlah sistem informasi yang ada dikali 100%	Dinkominfo
	Meningkatnya ketersediaan data statistik	Cakupan Ketersediaan	100%	Jumlah data makro daerah yang tersedia	Dinkominfo

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
	sebagai bahan perencanaan pembangunan	Data Makro Daerah (%)		dibagi 5 dikali 100%	
	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi (%)	1%	Prosentase sistem elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan risikonya dibagi jumlah sistem elektronik yang ada di OPD	Dinkominfo

D. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 6.387.768.616,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.909.896.766,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.477.871.850,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinkominfo Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Renstra (Rp)	Renja (Rp)	APBD (Rp)
Sasaran 1 : Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik	2.276.150.000	654.150.000	224.539.600

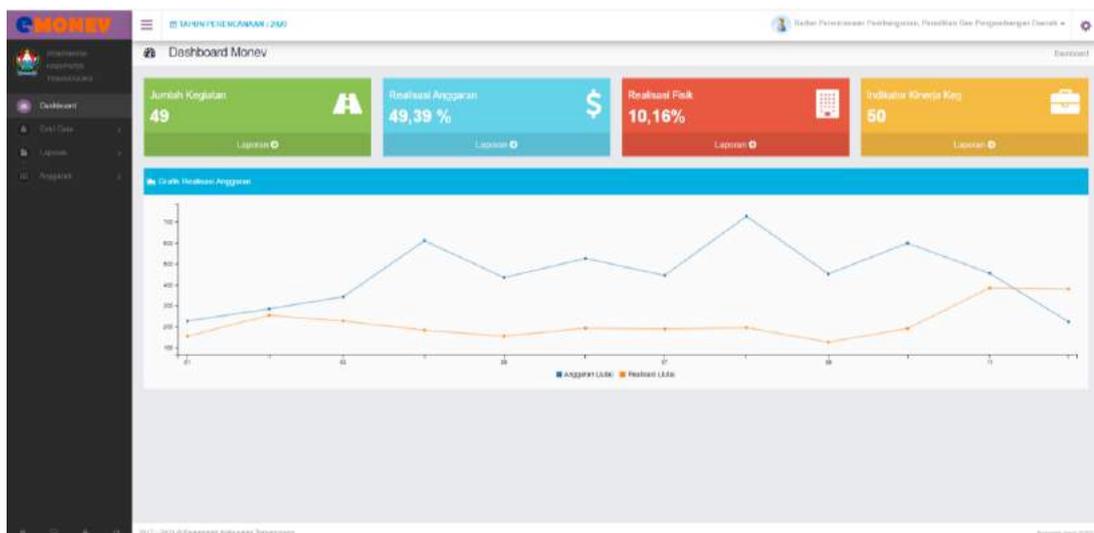
Sasaran	Renstra (Rp)	Renja (Rp)	APBD (Rp)
Sasaran 2 : Terwujudnya pengelolaan SPBE	8.598.000.000	3.538.000.000	2.648.333.000
Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan	475.000.000	475.000.000	239.806.200
Sasaran 4 : Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	165.000.000	165.000.000	46.333.550
Pendukung Urusan PD	591.850.000	561.850.000	318.859.500
JUMLAH	15.170.542.568	5.394.000.000	3.477.871.850

E. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. E-MONEV

Melalui aplikasi ini kemajuan fisik dan keuangan kegiatan dapat dipantau. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.



Gambar 2.1.
Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

2. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.



Gambar 2.2.
Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

3. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 2.3.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

4. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

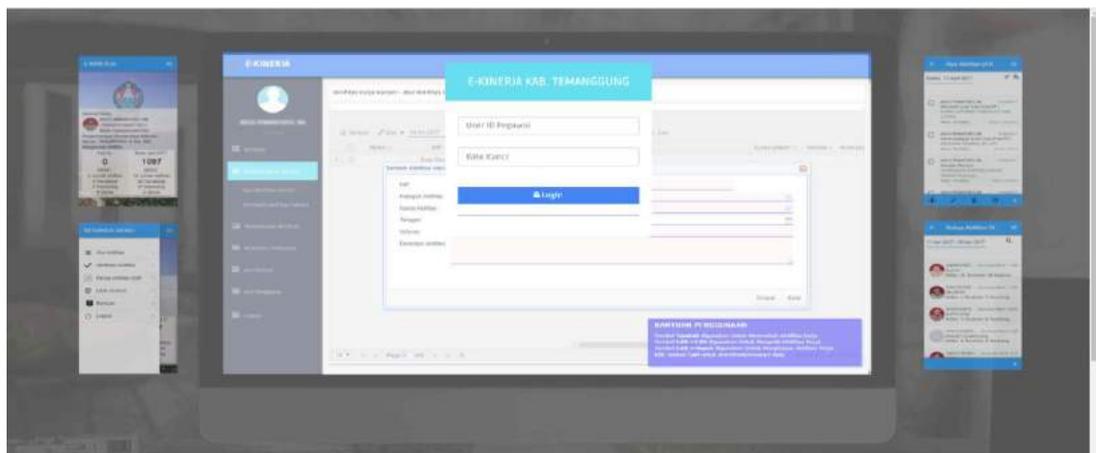
SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.



Gambar 2.4.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

5. e-KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



Gambar 2.5.
Sistem Informasi Kinerja ASN

6. SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjaagaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).



Gambar 2.6.
Sistem Informasi Kepegawaian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinkominfo Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Kinerja Utama Dinkominfo

a. Capaian Kinerja Tujuan Dinkominfo

Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan Dinkominfo yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 2 (dua) indikator yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Nilai keterbukaan informasi publik, guna menunjang pencapaian Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinkominfo Tahun 2019-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinkominfo Tahun 2019-2020

Tujuan (IKU)	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	2,82	100	2,75	2,82	100	80,57
Nilai keterbukaan informasi publik	78,30	80,03	100	78,80	95,50	100	100

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Tujuan Dinkominfo tahun 2020 dari masing-masing indikator:

- 1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tercapai 100%. Dari target yang ditetapkan sebesar 2,50 terealisasi 2,82, angka tersebut telah melampaui dari angkat target.
- 2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik tercapai 100%. Target yang ditetapkan sebesar 78,80, sementara realisasinya sebesar 95,50, angka capaian tersebut juga telah melampaui target yang ditetapkan.

Tentu saja capain tersebut kedepan harus ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan era digital saat ini.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat terhadap capaian kinerja sasaran Dinkominfo secara garis besar adalah:

Faktor pendorong antara lain:

- 1) Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
- 2) Tersedianya media informasi dan komunikasi yang dapat didayagunakan.
- 3) Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.
- 4) Sistem informasi saat ini sudah semakin lengkap dan efektif, yang didukung dengan beberapa SOP yang sudah ada.
- 5) Semangat PPID Utama didorong dukungan dari seluruh stakeholder, baik PPID OPD, Kecamatan dan Desa.

Faktor penghambat antara lain:

- 1) Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di Kabupaten Temanggung. Hal ini terjadi karena ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa. Penyebabnya antara lain:
 - Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi dan jangkauan tenaga listrik yang jauh.
 - Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dibidang teknis jaringan.
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, akar permasalahannya antara lain:
 - Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal.
 - Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah.
 - Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi.
 - Terbatasnya SDM di bidang TIK.

- 3) Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 - Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda.
 - Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
- 4) Belum optimalnya dukungan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Hal ini disebabkan antara lain:
 - Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih rendah.
 - Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik.
 - Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat.
 - Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.
- 5) Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku, serta ketersediaan data sektoral masih belum efisien karena belum adanya sistem keterpaduan data.

b. Capaian Kinerja Sasaran Dinkominfo

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinkominfo Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 4 sasaran dan 9 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Dinkominfo Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	3	5
2	Sangat baik	1	4
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		4	9

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dalam kategori “Memuaskan” dan 1 (satu) indikator sasaran dalam kategori “Sangat Baik”. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran Dinkominfo

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan (Kategori)
1	Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik	3	100	Memuaskan
2	Terwujudnya pengelolaan SPBE	4	88,46	Sangat baik
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan	1	100	Memuaskan
4	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	1	100	Memuaskan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran dan 9 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung tahun 2020 terdapat 3 indikator yang tercapai 100% atau kategori “Memuaskan”, sedangkan 1 indikator tercapai “Sangat baik”. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Dinkominfo Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 masuk dalam kategori **“Sangat baik”** yaitu berada pada rentang Capaian 100% berada pada angka 97,11. Capaian indikator tujuan dan

sasaran tahun 2020 ini merupakan capaian kinerja tahun kedua Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 capaian kinerja sasaran juga mencapai 97,11%.

Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik

Pada sasaran ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 (tiga) indikator kinerja yaitu persentase PPID badan publik yang aktif, persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif, dan persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 1
Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi Sd 2020	
Persentase PPID badan publik yang aktif	%	12	13,20	100	20	10,70	65,98
Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	15	15,63	100	30	15,63	52,08
Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik dapat dicapai sesuai dengan target, bahkan terdapat 2 (dua) indikator dari 3 indikator yang realisasinya diatas target dan 1 (satu) indikator sesuai target yaitu Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra;
- b. Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo;
- c. Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif;
- d. Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP;
- e. Pelayanan Informasi Publik;
- f. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika; dan
- g. Fasilitasi Pengembangan Media Center.

Dari 7 (tujuh) kegiatan yang masuk pada program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dapat dijabarkan output yang mendukung capaian kinerja sasaran program antara lain:

- Pengelolaan dan pembinaan PPID secara intensif pada tahun 2020 dengan cara penguatan kapasitas SDM pelaku PPID, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. Dari 341 badan publik yang menjadi kewenangan pembinaan PPID Utama Kabupaten Temanggung, tercatat ada 45 PPID yang masuk dalam kategori aktif, angka tersebut dibidang meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya terdapat 38 PPID yang aktif.
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan meskipun dilaksanakan secara daring. Dari 32 KIM tercatat ada 5 KIM aktif yang secara rutin melakukan kegiatan peningkatan literasi media

masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

- Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) sangat baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aduan pelanggaran norma dan etika siaran di Kabupaten Temanggung.

Pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai sasaran Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 1,20%. Dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 224.539.600,- realisasinya sebesar Rp. 221.849.874,- atau sebesar 98,80%.

Berikut ini disajikan dokumentasi kegiatan dalam rangka mendukung sasaran Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik.



Gb. 3.1.
Monitoring dan Evaluasi PPID Badan Publik
Kecamatan



Gb. 3.2.
Verifikasi SAQ dan Presentasi DIP di
Komisi Informasi Provinsi Jawa
Tengah



Gb. 3.3.
Uji Publik Badan Publik Kabupaten/
Kota Dalam Rangka Peningkatan
Badan Publik Se-Jawa Tengah



Gb. 3.4.
Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat dalam Diseminasi
Informasi



Gb. 3.5.
Pembuatan Video Diseminasi Informasi
Melalui FK Metra tentang 3M



Gb. 3.6.
Pelatihan microsoft office word dan excel kepada
guru Paud Khotijah Kec. Tembarak

2) Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pengelolaan SPBE

Pada sasaran ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pengelolaan SPBE

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2020	
Persentase ketersediaan akses internet publik	%	90	73,33	81,47	100	73,33	73,33
Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	82,03	82,03	100	82,03	82,03
Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	20	16,17	80,85	50	16,17	32,34
Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	45	52,77	100	60	52,77	87,95

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 2, Terwujudnya Pengelolaan SPBE tidak seluruhnya tercapai sesuai dengan target awal, hal ini terjadi karena:

1. Persentase ketersediaan akses internet publik ditahun 2020 target kinerjanya 90% hanya tercapai 73,33%, angka tersebut pada perencanaan Renstra 2019-2023 menghitung jumlah area publik yang ada di Kabupaten Temanggung sejumlah 45 titik, sementara kondisi pada tahun 2020 jumlah area publik mengalami penambahan menjadi sebanyak 60 titik. Jika dilihat dari cakupan ketersediaan jaringan internet publik ditahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 44 titik dibanding dengan tahun 2019 yang hanya 41 titik sebagaimana yang disajikan pada data pokok Bab II. Namun secara persentase angkanya menurun.

2. Persentase sistem informasi yang terintegrasi, target kinerja tahun 2020 adalah 20% namun hanya tercapai 16,17%, angka tersebut pada perencanaan awal Renstra 2019-2023 juga menghitung kondisi jumlah sistem informasi Kabupaten Temanggung yang ada pada tahun 2019 hanya terdapat 461 aplikasi, sementara pada tahun 2020 mengalami penambahan menjadi 507 aplikasi. Meskipun capaian persentasenya rendah namun jika dilihat dari outputnya mengalami kenaikan dibanding tahun 2019, dari 61 aplikasi terintegrasi di tahun 2019 menjadi 82 sistem informasi yang sudah terintegrasi di tahun 2020 ini.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program Pengelolaan aplikasi informasi, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi;
- b. Pengadaan Jaringan Komunikasi;
- c. Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik;
- d. Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi;
- e. Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre;
- f. Pengelolaan Domain dan Sub domain;
- g. Pengelolaan Data Centre; dan
- h. Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD.

Adapun output dari 8 (delapan) kegiatan yang secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan SPBE antara lain:

- Penambahan *coverage* jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung ke seluruh OPD, Kecamatan, UPT/eksUPT hingga ke kelurahan dan desa. Hingga akhir tahun 2020 tercatat ada 324 sambungan pengguna jaringan internet Pemkab Temanggung unsur kantor pemerintahan dan 44 sambungan di area publik. Meningkatnya jumlah sambungan pengguna pada jaringan internet Pemkab Temanggung merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemerataan infrastruktur TIK untuk mengurangi kesenjangan digital hingga ke kantor pemerintah desa. Hal ini berdampak

pada sektor pelayanan masyarakat yang semakin mudah, efektif dan efisien.

- Performansi jaringan terkait dengan availability peralatan repeater semakin baik dengan dilakukannya MoU Pengelolaan backup catu daya (kelistrikan) dengan pengelola local di area repeater jaringan. Dalam hal ini, Dinkominfo mengadakan peralatan backup catu daya dan didistribusikan ke area lokasi repeater untuk menjaga availability peralatan repeater pada saat terjadinya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- Kebutuhan bandwidth untuk seluruh server, OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT, Kelurahan, Desa dan area publik tercukupi dengan beberapa limitasi yang dikelola satu pintu oleh Dinkominfo. Pada tahun 2020, jumlah bandwidth yang disediakan untuk kebutuhan seluruh pengguna adalah 750 mbps. Limitasi yang diberikan kepada OPD adalah 100 mbps, Kecamatan 50 mbps, UPT/eks UPT antara 15 mbps s.d. 30 mbps, kelurahan dan desa 15 mbps, area publik 3 mbps.
- Tata kelola pita lebar (bandwidth) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang semakin baik. Distribusi bandwidth ke seluruh OPD satu pintu di Dinkominfo memberikan nilai efisiensi anggaran dan kinerja. OPD tidak dibebani pengelolaan bandwidth di internal OPD sehingga lebih focus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- Pengelolaan data center cukup baik dengan adanya shift piket di Network Operation Center (NOC) setiap hari selama 6 jam per hari. Di sisi lain, peralatan monitoring telah dilakukan peningkatan (upgrade) dengan peralatan yang mendukung, diantaranya adalah videowall, video processor, serta *tools* monitoring lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan domain dan sub domain serta system keamanan aplikasi berbasis web dengan SSL (Secure Socket Layer) untuk aplikasi-aplikasi bersifat internal dan rahasia
- Efektifitas pengelolaan Sumber Daya Manusia bidang TIK cukup baik. Pembuatan, pengembangan dan modifikasi aplikasi

dilakukan oleh Programmer di Dinkominfo, baik PNS maupun non PNS. sementara itu kebutuhan tenaga teknis jaringan difungsikan untuk membantu pemasangan baru, pemeliharaan, penambahan, dan penggantian peralatan di seluruh coverage jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung

- Portal MobileCity Kabupaten Temanggung berbasis android sudah dapat difungsikan. Sebagai pusat informasi dan pelayanan terpadu di Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang mudah diakses oleh internal pemerintah Kabupaten Temanggung, maupun masyarakat Kabupaten Temanggung, sebagai sumber informasi dan layanan di Kabupaten Temanggung.

Pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai sasaran Terwujudnya pengelolaan SPBE terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 0,89%. Dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.648.333.000,- realisasinya sebesar Rp. 2.624.822.872,- atau sebesar 99,1%.



Gb. 3.7.
Pemeliharaan jaringan fiber optik



Gb. 3.8.
Pemasangan jaringan berbasis radio



Gb. 3.9.
Fasilitasi vidcon Bupati dan jajaran Forkopimda



Gb. 3.10.
Fasilitasi vidcon di pendopo pengayoman



Gb. 3.11.
Pengembangan modul SKP pada aplikasi kinerja



Gb. 3.12.
Rapat koordinasi fasilitasi pembuatan aplikasi Dindikpora

3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan

Pada sasaran ini secara detail dilakukan pengukuran dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2020	
Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	%	100	100	100	100	100	100

Dari Tabel 3.7 di atas dapat diketahui bahwa Indikator sasaran meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan telah tercapai target 100% dengan kategori memuaskan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program pengembangan data statistik, yang didukung dengan 4 kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Statistik Daerah;
- b. Penyusunan Statistik Sosial;
- c. Penyusunan Statistik Ekonomi; dan
- d. Pengelolaan Bank Data Pembangunan Kabupaten Temanggung.

Data Makro Daerah yang disediakan urusan pemerintahan bidang statistik Dinas Komunikasi dan Informatika sejumlah 5 dokumen antara lain:

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- Buku NTP (Nilai Tukar Petani)
- Laju Inflasi
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 239.011.508 ,- atau 99,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 239.806.200,-.



Gb. 3.13.
Bimtek pengelolaan data spasial
di geoportals oleh diskominfo
provinsi jateng



Gb. 3.14.
Rapat Bank Data



Gb. 3.15.
Rapat Tim Pengumpul Data Kabupaten Temanggung

4) Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah

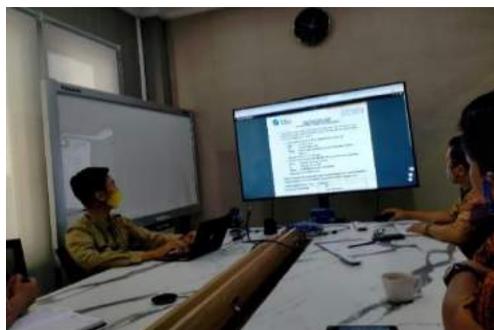
Pada sasaran ini hanya dilakukan pengukuran dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2020	
Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	%	1	0,43	0,43	1	0,43	43

Dari Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator sasaran meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah relatif sangat rendah, hal ini disebabkan pada tahun 2020 Dinkominfo Kabupaten Temanggung urusan persandian tidak melakukan assesment dikarenakan adanya refocusing anggaran.



Gb. 3.16.

Self assesment tingkat keamanan informasi menggunakan indeks KAMI



Gb. 3.17.

Sosialisasi tentang sertifikat elektronik

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinkominfo Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 6.387.768.616,- terealisasi sebesar 98,05% atau sebesar Rp. 6.263.486.474,-. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

➤ Belanja Tidak Langsung,

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai, pada tahun anggaran 2020 Dinkominfo Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.909.896.766,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.834.198.788,- atau sebesar 97,39% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.

➤ Belanja Langsung,

Belanja langsung pada tahun anggaran 2020 digunakan untuk melaksanakan 8 program dan 39 kegiatan, dari 39 kegiatan tersebut berkurang menjadi 37 kegiatan karena terdapat *refocusing* anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 3.477.871.850,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 3.429.287.686,- atau sebesar 98,6% dari total anggaran Belanja Langsung.

Secara rinci dapat diuraikan sebagaimana tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel. 3.9
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis
Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik				
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	224.539.600	221.849.874	98,80%
a	Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra	2.918.000	2.918.000	100%
b	Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo	188.000	188.000	100%
c	Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif	44.066.400	44.044.330	99,95%
d	Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP	29.249.200	29.227.130	99,92%
e	Pelayanan Informasi Publik	63.110.200	60.508.746	95,88%
f	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	4.151.000	4.151.000	100%
g	Fasilitasi Pengembangan Media Center	80.856.800	80.812.668	99,95%
	Jumlah Sasaran 1	224.539.600	221.849.874	98,80%
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pengelolaan SPBE				
	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.648.333.000	2.624.822.872	99,11%
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	305.180.200	294.895.422	96,63%
b	Pengadaan Jaringan Komunikasi	122.981.400	122.534.200	99,64%
c	Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik	1.271.500	1.271.500	100,00%
d	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	113.897.200	113.795.700	99,91%
e	Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	467.380.800	465.566.694	99,61%
f	Pengelolaan Domain dan Sub domain	67.995.800	60.576.000	89,09%
g	Pengelolaan Data Centre	82.866.800	82.854.730	99,99%
h	Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	1.486.759.300	1.483.328.626	99,77%
	Jumlah Sasaran 2	2.648.333.000	2.624.822.872	99,11%
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan				
	Program pengembangan data Statistik	239.806.200	239.011.508	99,67%

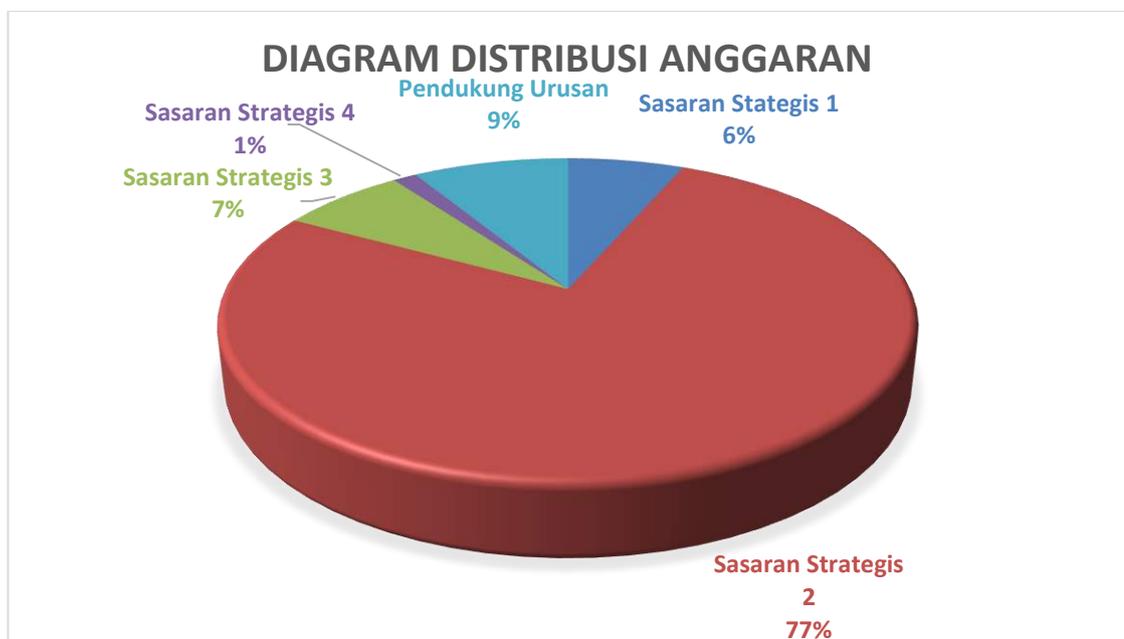
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
a	Penyusunan Statistik Ekonomi	101.887.000	101.834.000	99,95%
b	Penyusunan Statistik Sosial	36.174.200	36.260.000	100,24%
c	Penyusunan Statistik Daerah	65.168.500	65.099.100	99,89%
d	Pengelolaan Bank Data Pembangunan	36.576.500	35.818.408	97,93%
	Jumlah Sasaran 3	239.806.200	239.011.508	99,67%
Sasaran strategis 4 : Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah				
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	46.333.550	45.489.502	98,18%
a	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	46.333.550	45.489.502	98,18%
	Jumlah Sasaran 4	46.333.550	45.489.502	98,18%
	Jumlah 1+2+3+4	3.159.012.350	3.131.173.756	99,11%

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinkominfo Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut:

Tabel. 3.10
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	5.000.000	4.996.600	99,93%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	5.000.000	4.996.600	99,93%
	Program pelayanan administrasi perkantoran	185.047.500	177.762.329	96,06%
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000	5.365.793	63,88%
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000	4.994.400	99,89%
c	Penyediaan alat tulis kantor	14.000.000	13.993.200	99,95%
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000	11.856.750	98,81%
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.200.000	7.897.500	96,31%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	2.640.000	88,00%
g	Penyediaan makanan dan minuman	24.750.000	22.292.300	90,07%
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	23.698.000	23.687.000	99,95%
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	16.000.000	15.992.000	99,95%
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	69.999.500	69.043.386	98,63%
	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	117.850.000	104.394.637	88,58%
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	-	0,00%
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	-	0,00%
c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	23.906.845	95,63%
d	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71.350.000,00	60.520.792	84,82%
e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.500.000,00	4.070.000	74,00%
f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.000.000,00	15.897.000	99,36%
	Program peningkatan disiplin aparatur	10.962.000	10.960.364	99,99%
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.962.000	10.960.364	99,99%
	Jumlah	318.859.500	298.113.930	96,14%



Gambar 3.18.
Distribusi anggaran menurut sasaran strategis
Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran 2 mendapatkan porsi yang paling banyak (77%) yang didukung oleh 1 (satu) program, kemudian disusul oleh Sasaran penunjang urusan PD yang didukung oleh 4 (empat) program (9%), selanjutnya Sasaran 3 (7%) yang didukung oleh 1 (satu) program, Sasaran 1 (6%) 1 (satu) program, dan porsi terendah adalah sasaran 4 (1%) dengan didukung hanya 1 program juga. Adapun perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis DINKOMINFO Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

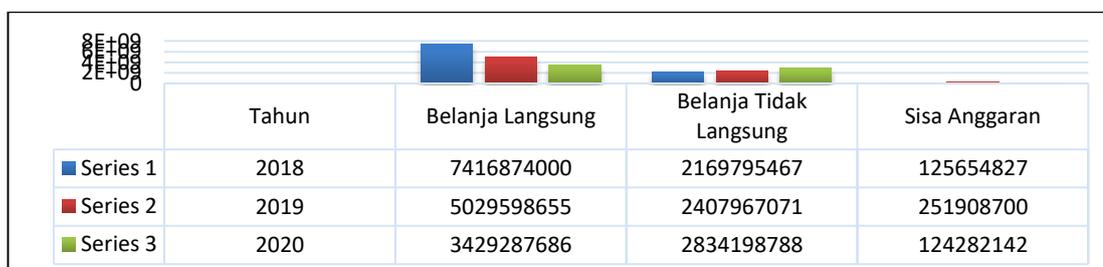
URAIAN	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
BTL	2.559.207.966	2.407.967.071	94,09	2.909.896.766	2.834.198.788	97,39
BL	5.130.266.460	5.029.598.655	98,04	3.477.871.850	3.429.287.686	98,60
TOTAL	7.689.474.426	7.437.805.726	96,73	6.387.768.616	6.263.486.474	91,39

Sumber : Laporan Keuangan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan 2020

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan dibanding tahun 2019, khususnya untuk alokasi Belanja Langsung. Sementara untuk anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan 15,03% karena pada tahun 2020 terdapat penambahan ASN sebanyak 2 orang.

Penurunan anggaran pada tahun 2020 terjadi akibat adanya refocusing anggaran guna penanganan dampak pandemi covid-19.

Berikut disajikan grafik realisasi anggaran Dinkominfo Kabupaten Temanggung TA 2018 sd. 2020.



Gambar 3.19.
Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Sisa Anggaran Dinkominfo Kabupaten Temanggung TA 2018-2020

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinkominfo Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik	98,80	100	1,20
2	Terwujudnya pengelolaan SPBE	99,11	88,46	0,89
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan	99,67	100	0,33
4	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	98,18	100	1,82
	Rata-Rata	98,94	97,12	1,06

Jika dibandingkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 98,94% dengan capaian kinerja sebesar 97,12% maka terjadi ketimpangan sebesar 1,82% antara anggaran dengan capaian kinerja. Namun jika diukur antara anggaran dengan realisasi maka terdapat efisiensi sebesar 1,06%

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan yang diraih Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 antara lain:

1. Penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, mendapat peringkat VII dengan kategori “Menuju Informatif”.
2. Peringkat X Media Center Daerah Tingkat Nasional Tahun 2019 Kontribusi aktif dalam produksi foto pada portal berita infopublik.id.

NILAI KAB/KOTA
DALAM RANGKA PEMERINGKATAN KETERBUKAAN BADAN PUBLIK TAHUN 2020

KAB/KOTA	Penilaian Tahap 1 / Informasi Wajib Berkala	Penilaian Tahap 2/ Kuesioner Penilaian Mandiri	Penilaian Tahap 3/ Verifikasi dan Penambahan SK Dikucualikan	Penilaian Tahap 4/ Uji Publik Penetapan Peringkat	TOTAL	KATEGORI	PERINGKAT
	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai			
KOTA SEMARANG	100	99,3	95,0	98,7	98,3	INFORMATIF	I
KAB. DEMAK	100	98,0	97,5	94,7	97,5	INFORMATIF	II
KAB. BATANG	100	99,3	92,5	97,8	97,4	INFORMATIF	III
KOTA SURABAYA	100	100,0	90,0	98,3	97,1	INFORMATIF	IV
KAB. KLATEN	100	100,0	89,8	93,2	95,7	MENJUJI INFORMATIF	V
KAB. BREBES	100	98,0	92,5	94,0	95,6	MENJUJI INFORMATIF	VI
KAB. TEMANGGUNG	100	94,7	95,0	92,5	95,5	MENJUJI INFORMATIF	VII
KAB. BANYUMAS	100	100,0	85,0	94,5	94,9	MENJUJI INFORMATIF	VIII
KAB. WONOGIRI	90	100,0	94,8	93,1	94,5	MENJUJI INFORMATIF	IX
KAB. KEBUMEN	100	99,3	85,0	93,0	94,3	MENJUJI INFORMATIF	X
KAB. REMBANG	100	95,0	85,0	95,3	94,3	MENJUJI INFORMATIF	
KAB. PURBALINGGA	100	90,7	85,7	96,8	93,5	MENJUJI INFORMATIF	
KAB. SUKOHARJO	100	94,0	87,0	91,3	93,1	MENJUJI INFORMATIF	
KAB. WONOSOBO	96	100,0	80,0	95,8	93,0	MENJUJI INFORMATIF	
KAB. KARANGANYAR	90	100,0	84,2	98,3	92,6	MENJUJI INFORMATIF	
KOTA MAGELANG	94	98,0	86,8	92,8	92,4	MENJUJI INFORMATIF	
KAB. KUDUS	98	90,0	84,5	96,5	92,3	MENJUJI INFORMATIF	
KOTA PEKALONGAN	92	99,3	77,5	95,2	91,0	MENJUJI INFORMATIF	
KAB. KENDAL	100	98,0	85,8	91,3	88,8	MENJUJI INFORMATIF	
KAB. TEGAL	90	96,7					
KOTA SALATIGA	90	96,7					
KAB. PEKALONGAN	94	88,7					
KAB. BANJARNEGARA	90	92,8					
KAB. CILACAP	90	89,3					
KAB. BOYOLALI	84	92,7					
KAB. PATI	78	86,0					

Gb. 3.20.

Lampiran Surat Keputusan Komisi Informasi Publik tentang
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masa Pandemi Covid-
19 Tahun 2020



Gb. 3.21.
Piagam Penghargaan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masa Pandemi Covid -19 Tahun 2020



Gambar 3.22.
Piagam Pernghargaan Pemingkatan Media Center Daerah Tingkat Nasoinal Tahun 2019 Kontribusi aktif dalam produksi foto pada portal berita infopublik.id

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Kabupaten Temanggung disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Tahun 2020 ini juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, laporan kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinkominfo Kabupaten Temanggung kepada masyarakat.

1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinkominfo Kabupaten Temanggung sebagai organisasi perangkat daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika mempunyai fungsi untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Keberhasilan Dinkominfo dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah disajikan, maka dapat dikatakan bahwa Dinkominfo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat baik.

2. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinkominfo di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Dinkominfo dalam menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Memberikan pemahaman para pimpinan SKPD, stakeholder dan masyarakat agar dapat bersinergi dengan Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan dan pengembangan teknologi informasi guna mendorong akselerasi pembangunan.
4. Memberikan sosialisasi, edukasi dan pencerahan kepada masyarakat untuk mengubah mindset (pola pikir) masyarakat menuju “masyarakat informasi” Kabupaten Temanggung.
5. Menempatkan pembangunan teknologi informasi sebagai prioritas utama pembangunan, di samping pembangunan prioritas lainnya.
6. Meningkatkan intensitas sosialisasi, pendekatan dan komunikasi persuasif untuk memberikan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk menuju tata pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinkominfo Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Februari 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jend. Sudirman No. 41/42 Temanggung 56218 Telp. (0293) 491004 Fax (0293) 491040
E-mail: info@temanggungkab.go.id Website: www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAMSUL HADI, S.Sos, MT
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. AL KHADZIQ
Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2021

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama
KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN TEMANGGUNG

SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196606051986071002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	Angka
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	79,30	Angka

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung	3.513.658.416,-	APBD
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.604.986.900,-	APBD
3	Program Aplikasi Informatika	2.757.638.000,-	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	244.999.200,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	125.000.000,-	APBD

Temanggung,

2021

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama
KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jend. Sudirman No. 41/42 Temanggung 56218 Telp. (0293) 491004 Fax (0293) 491040
E-mail: info@temanggungkab.go.id Website: www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SADWOKO HERI SUSATYO, S.E.,M.Si.
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. AL KHADZIQ
Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 20 Oktober 2020

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama
KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN TEMANGGUNG

SADWOKO HERI SUSATYO, S.E.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196010091989031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,75	Angka
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	78,70	Angka

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	224.539.600	APBD
2	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.559.645.400	APBD
3	Program pengembangan data statistik	239.806.200	APBD
4	Program penyelenggaraan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	46.333.550	APBD

Temanggung, 20 Oktober 2020

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama
KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN TEMANGGUNG



SADWOKO HERI SUSATYO, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196010091989031007

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA						REALISASI KINERJA			CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS	RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24
INDIKATOR TUJUAN																				
	Indek Pembangunan Manusia		-	68,69	69,22	69,54	69,84	70,16	70,49	68,83	69,37	98,69	AT			IPM adalah suatu nilai indeksasi tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli untuk mengembangkan tingkat pembangunan manusia disuatu wilayah Rumus = Akar pangkat tiga hasil perkalian indeksasi kesehatan, pendidikan, dan penghasilan dikalikan 100	-Tingkat kesehatan usia harapan hidup -Pendidikan = harapan lama sekolah -Penghasilan = pendapatan perkapita	Usia harapan hidup penduduk Temanggung yang tinggi yaitu 75,47 th	-Angka harapan lama sekolah masih relatif rendah -Daya beli masyarakat Temanggung yang masih rendah	-Meningkatkan pogram bantuan penduduk miskin -Meningkatkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja
	Pertumbuhan Ekonomi		-	5,13	5,2	5,3	5,6	5,8	6,0	5,05	5,05	84,17	AT			PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dikalikan 100%	Menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Perkembangan PDRB ADHK yang cenderung meningkat setiap tahun	Masih kecilnya distribusi PDRB selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Perupaya peningkatan sub sektor selain pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan bimbingan dari investasi
	Inflasi		-	2,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,66	2,66	66,50	AT			In = IHK thn N dikurangi IHK N-1 dibagi IHK N-1 dikalikan 100%	-In = inflasi/deflasi tahun-N -IHKn = Indeks Harga th N -IHKn-1 = Indeks harga th N-1	-Inflasi di Kab. Temanggung masih tergantung inflasi rendah -Selama 3 thn kebelakang tren inflasi menurun -Kurun 2 thn kebelakang inflasi di Kab. Temanggung dibawah inflasi provinsi dan nasional	Inflasi di Kab. Temanggung fluktuatifnya dipengaruhi produk-produk hasil pertanian dimana produk hasil pertanian dipengaruhi cuaca dan monopoli harga produk pertanian	-Pentingnya Pemkab Temanggung dalam membantu pemasaran produk pertanian -Campur tangan Pemkab Temanggung untuk membantu menjaga kesetabilan harga jual produk pertanian
	Pendapatan per Kapita		Juta Rp	26,46	27,5	28,7	29,8	30,9	31,9	28,05	28,05	87,93	AT			PDRB ADHB th-n dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun	Menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku disuatu wilayah dan jumlah penduduk yang berdistribusi di wilayah tersebut dalam tahun yang sama	Selam kurun waktu 5 tahun terakhir pendapatan perkapita selalu mengalami kenaikan	Masih kurang berkembangnya sub sektor diselain sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Memberikan bimbingan keterampilan stimulus agar sub sektor selain perikanan berkembang, meningkatkan investasi masuk ke Kab. Temanggung
	Tingkat Pengangguran Terbuka		Juta Rp	3,24	3,2	3,15	3,10	3,05	2,97	2,99	3,85	70,37	AT			Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%	-Untuk mengetahui persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran -Variabel penyusun diperoleh dari kegiatan SAKERNAS BPS	Angka pengangguran Kab. Temanggung termasuk rendah	Bias dengan setengah pengangguran dan yang banyak terjadi di sektor pertanian	Menciptakan lapangan kerja lewat investasi, membina UKM untuk berkembang

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDUK/OK/INIBERIA/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	REALISASI PER TRIMULAN										CAPAIAN 2020			REALISASI 2020			CAPAIAN 2021			REK				
				I		II		III		IV		V		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp			
4073	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Peningkatan sarana prasarana aparatur	%	100	1.670.500.000	100	1.450.484.075	100	301.350.000	117.850.000	100	32.844.323	100	16.553.000	100	15.797.037	100	36.694.173	100	104.394.637	100	253.878.742	100	253.878.742	100	15.20	
4073.001	Pengadaan barang modal	Pengadaan barang modal	barang	10	50.000.000	3	26.830.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26.830.000	16,67	16,7		
4073.002	Pembelian barang modal	Pembelian barang modal	barang	16	245.000.000	3	48.815.260	0	71.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	48.815.260	16,75	10,87		
4073.003	Pembelian barang modal	Pembelian barang modal	barang	50	1.370.000.000	17	14.125.000	25.000.000	25.000.000	0	41.890.845	3	364.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	95,83	24	38.067.545	40,00	28,10
4073.004	Pembelian barang modal	Pembelian barang modal	barang	50	775.000.000	13	49.125.125	11.350.000	71.350.000	0	14.853.883	3	12.346.867	3	12.346.867	3	17.624.172	12	63.520.792	100	84,82	24	110.245.917	40,00	40,06		
4073.005	Pembelian barang modal	Pembelian barang modal	barang	50	15.500.000	12	5.668.000	5.500.000	5.500.000	0	900.000	3	300.000	3	300.000	3	2.120.000	12	4.070.000	100	14,19	24	14.068.000	40,00	34,96		
4073.006	Pembelian barang modal	Pembelian barang modal	barang	50	20.000.000	0	0	0	0	0	200.000	3	1.900.000	3	1.900.000	3	1.420.000	3	12.797.000	100	89,36	12	15.897.000	20,00	79,46		
4073.007	Pembelian barang modal	Pembelian barang modal	barang	50	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH				100	33.837.346.000	47.57.844.155	5.254.000.000	3.477.811.850	1.185.431.890	660.393.175	1.086.577.796	3.429.287.606	8.187.091.841	100	10.960.364	100	10.960.364	100	10.960.364	100	10.960.364	100	10.960.364	100	10.960.364	100	41,84
4074	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	%	100	25.000.000	100	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4074.001	Pengadaan barang modal	Pengadaan barang modal	barang	50	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH				100	25.000.000	47.57.844.155	5.254.000.000	3.477.811.850	1.185.431.890	660.393.175	1.086.577.796	3.429.287.606	8.187.091.841	100	10.960.364	100	10.960.364	100	10.960.364	100	10.960.364	100	10.960.364	100	10.960.364	100	41,84

Komisi yang bertugas dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dan pemantauan hasil saat penyelesaian kegiatan ini yang pelaksanaannya akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Disusun
 Temanggung, 10 Januari 2021
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Temanggung
DINOMING
 GOTRI WUJAN TO WURATMOJO, S.STP, M.Si
 Pemana Tk. I
 NIP. 197712121997031006

Disetujui
 Temanggung, 10 Januari 2021
 Kepala BAPPEDA
 Kabupaten Temanggung
Ruph Maw
 RIPTO SUSILO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196704271987031001

Faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini yang pelaksanaannya akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Temanggung tahun 2021.

PRESTASI PRANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	16-12-2020	Peringkat VII Keterbukaan Informasi Publik Kategori "Menuju Informatif"	Komisi Informasi Prop. Jateng	Pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
2	22-07-2020	Kontribusi aktif dalam produksi foto pada portal berita infopublik.id.	Kementerian Kominfo Pusat	Peringkat X Media Center Daerah Tingkat Nasional Tahun 2019

**FOTO PIAGAM PENGHARGAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG**



Piagam Penghargaan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masa Pandemi Covid -19 Tahun 2020



Piagam Penghargaan Peningkatan Media Center Daerah Tingkat Nasional Tahun 2019 Kontribusi aktif dalam produksi foto pada portal berita infopublik.id

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												KETERANGAN
		I		II								III			IV									
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	30	75	100	100	Penyusunan Statistik Daerah	Tersedianya data dan publikasi data statistik kabupaten Temanggung	1 dok.	Pengadaan data statistik Kabupaten	8	9	10	11	12	11									
		25	50	75	100	Pengelolaan Bank Data Pembangunan	Tersedianya data-data hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung (Sumber Data dari OPD)	12 bulan	Penyediaan data hasil pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari OPD	48.014.600	Kabid Statistik													
4	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah					215 - PERSANDIAN Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				127.645.000														
		25	50	75	100	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Terwujudnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	26 OPD	Pengelolaan keamanan informasi dan piket persandian	127.645.000	Kasi Persandian dan Pengamanan Informasi													
5	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah					407 - PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH Program perencanaan, evaluasi, dan kelibangan perangkat daerah				541.656.000														
		25	50	75	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKjIP, LPPD, RfK, dan RTP)	33 dok.	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	5.000.000	Sekretaris Dinas													
		25	50	75	100	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terbayarnya rekening tagihan telepon	12 bulan	Pembayaran tagihan telepon	263.995.500														
		25	50	75	100	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				21.996.000	Sekretaris Dinas													

**CASCADING KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFRMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN
1	Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di Kabupaten Temanggung	Ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan beberapa faktor antara lain: <ul style="list-style-type: none"> > Faktor geografi > Jangkauan tenaga listrik jauh Terbatasnya SDM 	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan Meningkatkan kualitas layanan SPBE Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi Mengintegrasikan data dan sistem layanan informasi berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas sistem pengamanan informasi Meningkatkan kualitas SDM
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	Banyaknya sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi Terbatasnya SDM di bidang TIK 							
3	Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah	Banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi Masih minimnya SDM di bidang TIK 							

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJUKAN
4	Masih perlunya peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik	Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih belum merata	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik • Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat • Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi 				Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik • Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik • Peningkatan ketersediaan data-data statistik 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan • Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi • Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyediakan data makro daerah • Optimalisasi ketersediaan data pembangunan daerah melalui single data
5	Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang • Ketersediaan data sektoral masih kurang efisien karena belum adanya sistem data terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya kewenangan daerah selain BPS untuk mengolah data makro daerah • Belum adanya sumber daya manusia yang berbasis statistik • Masih ada beberapa data yang berbeda dihasilkan dari sumber data yang sama 							

